

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DALAM
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BUTON**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

LA SAFILIN
NIM. 0149464777

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2009**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Buton“, adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Kendari, Juni 2009
Yang Menyatakan,



(LA SAFILIN)
NIP. 014964777

ABSTRAK**Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Buton**

LA SAFILIN

Universitas Terbuka Kendari
lasafilin@yahoo.co.id**Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Kualitas Pendidikan.**

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pemerintah wajib belajar sembilan tahun terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pemerintah wajib belajar sembilan tahun terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton.

Penelitian ini membahas efektivitas implementasi kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton, dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif sedangkan alat pengumpulan data adalah menggunakan angket sebagai data primer, sedangkan wawancara dan dokumentasi sebagai data sekunder. Data hasil angket penelitian dibuat dalam bentuk transformasi nilai dengan sistem skor 0 – 20 dikategorikan tidak efektif, 21 – 40 dikategorikan kurang efektif, 41 – 60 dikategorikan cukup efektif dan 61 – 80 dikategorikan efektif dan 81 – 100 dikategorikan sangat efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Wajib Belajar 9 Tahun Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten sangat efektif. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Wajib Belajar sembilan Tahun dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Buton adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, lingkungan sosial, ekonomi, politik dan budaya, letak geografis suatu daerah, adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta kurangnya pemahaman dan kesadaran orang tua maupun peserta didik terhadap arti dan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan masa depan.

ABSTRACT**The Effectiveness of Policy Implementation of the Government Through Compulsory Nine –Year Basic Education in Improving of Education Quality in Buton Regency .**

LA SAFILIN

Universitas Terbuka Kendari
lasafilin@yahoo.co.id**Key Word :** Policy of Government, compulsory nine-year basic education and quality of education

This research focussed on the problem How was the effectiveness of policy Implementation of the government through Compulsory Nine-Year Basic Education?, and what factors influenced the effectiveness of policy implementation of the Government through Compulsory Nine-Year Basic Education in improving the education quality?. This research aimed at analyzing the Effectiveness of policy Implementation of the Government, and factors influencing of the Effectiveness of policy Implementation of the government through compulsory Nine-Year Basic Education in improving the education quality.

The design of this study used qualitative descriptive using questionnaires as the mean instrument to get primary data, interview and documentation to get secondary data. The result of the questionnaires were designed by using transformation value with range of scores : 0 to 20 was categorized no effective, 21 to 40 was categorized less effective, 41 to 60 was categorized enough, 61 to 80 was categorized effective, and 81 to 100 was categorized the most effective.

Based on those findings, this study indicated that the Effectiveness of policy Implementation of the Government through Compulsory Nine-Year Basic Education in improving quality of education: in Buton Regency was the most effective. Meanwhile, there were many factors influencing the effectiveness of policy Implementation of the Government through Compulsory Nine-Year Basic Education as follows: communication, human resources, disposition, bureaucrat structure, social environment, economic, politic, culture, geographic location, School Block Grant Aid, Special Fund Allocation, lack of awareness and understanding of parents.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang
Wajib Belajar Sembilan Tahun Dalam Peningkatan
Kualitas Pendidikan di Kabupaten Buton

Penyusun TAPM : La Safilin
NIM : 014964777
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II



Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA
NIP . 130 367 157

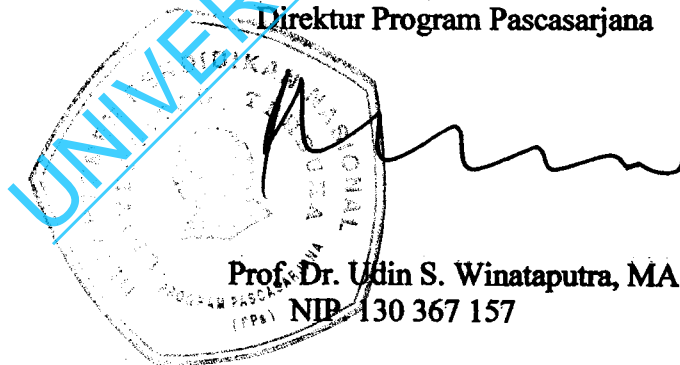
Pembimbing I



Dr. GUNAWAN, MSi
NIP. 131 885 181

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA
NIP. 130 367 157

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINSTASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : LA SAFILIN
 NIP : 014964777
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul Tesis : Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang
 Wajib Belajar Sembilan Tahun Dalam Peningkatan
 Kualitas Pendidikan di Kabupaten Buton

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana,
 Program Studi Administrasi Publik , Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Juli 2009
 Waktu : 09.30 – 11.30

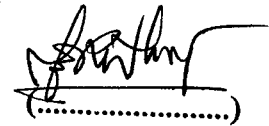
Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

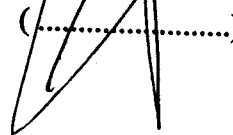
Ketua Komisi Penguji : SUCIATI, Ph.D



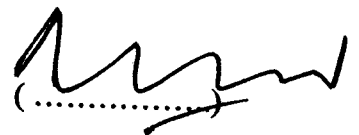
Penguji Ahli : Dr. WELFRIDUS B. ELU, M.Si



Pembimbing I : Dr. GUNAWAN, M.Si.



Pembimbing II : Prof. Dr. UDIN S. WINATAPUTRA, MA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, penyusunan karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana dengan Judul "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Buton." Penelitian ini dilaksanakan karena implementasi pendidikan dasar wajib belajar sembilan tahun yang telah dicanangkan pemerintah tahun 1994 di setiap propinsi dan kabupaten sangat bervariasi dan belum terlaksana secara efektif termasuk pada Propinsi Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Buton.

Penyusunan karya tulis ini merupakan salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi pada Program Magister Jurusan Manajemen Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Kendari.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik moral maupun material dalam penyusunan karya tulis ini, khususnya kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta yang telah memberikan kebijakan pada Universitas Terbuka Kendari untuk membuka Program Pascasarjana khususnya Program Studi Manajemen Administrasi Publik sehingga penulis memperoleh kesempatan dalam melanjutkan pendidikan para Program Magister (S2).
2. Kepala UPBJJ – UT Kendari yang telah memfasilitasi dan membimbing penulis dalam penyusunan karya tulis sehingga dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu.
3. Pengelola Program Pascasarjana dan Dosen Universitas Terbuka di Kendari yang telah mengajar dan memberikan bekal ilmu pengetahuan.
4. Bapak Dr. GUNAWAN, MS.i, selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak mengarahkan dan membimbing sehingga karya tulis ini dapat tersusun dengan baik.

5. Bapak Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA., selaku dosen pembimbing II yang telah turut pula berperan dalam mengarahkan dan membimbing sehingga karya tulis ini dapat tersusun dengan baik .
6. Rekan-rekan mahasiswa pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka di Kendari, Program Administrasi Publik yang telah memberikan dorongan moral sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam penyusunan karya tulis selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan judul tesis yang penulis kemukakan saat ini.

Bau-Bau, Juni 2009,

Penulis,



LA SAFILIN

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul Penelitian	i
Surat Pernyataan Keaslian Karya Tulis	ii
Abstrak	iii
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Kegunaan Penulisan.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Konsep Efektifitas.....	6
B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	12
C. Konsep Implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	25
D. Konsep Kualitas Pendidikan dan Indikatornya	28
E. Kerangka Pemikiran	36
F. Definisi Operasional	37
BAB III. METODE PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	39
B. Populasi dan Sampel	39
C. Informan Penelitian	40
D. Instrumen Penelitian	40
E. Prosedur Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data	41
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton	43
B. Efektifitas Implementasi Wajib Belajar Sembilan Tahun	63
C. Pembahasan	72

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	102
A. Simpulan	102
B. Saran-Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

Gaambar :	Halaman
1. Hubungan Mutu Pendidikan dan <i>Output</i> Lulusan	33
2. Kerangka Pemikiran	37
3. Rancangan Analisis data	41

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
4.1 Keadaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton	46
4.2 Keadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton.	48
4.3 Keadaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton.	50
4.4. Keadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton.	52
4.5 Keadaan Guru Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton.	54
4.6 Keadaan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton.	56
4.7 Keadaan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton.	61
4.8 Keadaan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Usia SD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton.....	65
4.9 Keadaan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Usia SMP Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton	67
4.10 Keadaan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Usia SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton	69
4.11 Data Hasil Responden Penelitian	72
4.12 Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dapat Meningkatkan Kualitas Pendidikan.....	73
4.13 Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Dapat Meminimalkan dan Mengatasi Siswa yang Putus Sekolah	74
4.14 Program Pemerintah tentang Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat Membantu Orang Tua Siswa yang Kurang Mampu.....	75
	xii

4.15	Program Pemerintah tentang Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat Meringankan Beban Orang Tua	76
4.16	Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dapat mendorong Angka Partisipasi Kasar Usia Sekolah 07 – 15 tahun meningkat	77
4.17	Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun , bukan berarti pihak sekolah setiap akhir tahun ajaran siswanya harus lulus atau naik kelas.	78
4.18	Setiap akhir tahun ajaran siswa harus lulus atau naik kelas karena apabila ada yang tidak berhasil maka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun belum terlaksana secara efektif	79
4.19	Ruang kelas kegiatan proses belajar mengajar cukup representatif antara jumlah siswa dengan jumlah rombongan belajar.....	80
4.20	Buku pelajaran penunjang proses belajar mengajar cukup memadai	81
4.21	Setiap akhir tahun ajaran siswa yang putus sekolah pada setiap sekolah sejumlah	82
4.22	Faktor penyebab siswa putus sekolah	83
4.23	Pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun telah berjalan secara efektif	84
4.24	Program pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan non formal khususnya paket A, B dan C sebaiknya dihapus saja sehingga siswa lebih serius untuk belajar pada pendidikan formal	85
4.25	Program pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan non formal khususnya paket A, B dan C dapat menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun	86
4.26	Program pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan non formal khususnya paket A, B dan C tetap dilaksanakan namun perlu ada penyempurnaan karena program tersebut dapat menurunkan motivasi belajar siswa yang sekolah di pendidikan formal	87
4.27	Pelaksanaan program paket A, B dan C harus melalui proses tatap muka dengan tutor	88
4.28.	Mayoritas siswa usia sekolah SD dan SMP telah memperoleh pendidikan dasar 09 tahun	89

4.29	Program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun khususnya adanya bantuan operasional sekolah (BOS) sangat membantu dan meringankan beban orang tua siswa.....	90
4.30	Manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya program wajib belajar 9 tahun	91
4.31	Implementasi kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 9 Tahun tahun adalah salah satu Program pemerintah dalam upaya mengantisipasi tuntutan global.....	92
4.32	Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dapat mengatasi kurang angka pengangguran pada setiap desa/kecamatan	93
4.33	Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dapat meningkatkan kualitas pendidikan setiap tahun secara signifikan	94
4.34	Orang tua siswa sangat antusias untuk menyekolahkan anak-anaknya pada pendidikan dasar 9 tahun karena dapat meringankan beban ekonomi keluarga	95
4.35	Kekurangan sarana ruang belajar mengajar dapat diatasi karena adanya program wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah	96
4.36	Dalam mengantisipasi tuntutan global sekarang pemerintah seharusnya sudah menerapkan pendidikan dasar wajib belajar 12 tahun ...	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton	107
2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton	112
3. Daftar Tabulasi Data Hasil Penelitian	113
4. Daftar Hasil Ujian Nasional SMP Kabupaten Buton Tahun ajaran 2005/ 2006 – 2007/2008	115
5. Daftar Lokasi Penelitian.....	117
6. Daftar Rangkuman Hasil Wawancara Penulis dengan Responden	118
7. Daftar Pedoman Wawancara	120
8. Daftar Angket Penelitian	122
9. Biodata Penulis	126
10. Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Terbuka Kendari	127
11. Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buton.....	128
12. Rekomendasi Penelitian dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten	129
13. Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Lingkup Dinas pendidikan Nasional.....	130
14. Surat Keterangan Izin Kuliah dari Bupati Buton	131

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pembangunan negara-negara maju adalah tersedianya penduduk yang terdidik dalam jumlah, jenis dan tingkat yang memadai. Oleh sebab itu hampir semua bangsa menempatkan pembangunan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional, karena dengan adanya pendidikan akan dapat memacu perkembangan suatu bangsa.

Menyadari akan hal tersebut di atas maka pemerintah pada tahun 1994 telah mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan semua warga negara Indonesia memiliki pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Pertama dengan kualitas yang baik. Dengan bekal itu diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya sehingga mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pencanangan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang dilaksanakan tahun 1994 diharapkan dapat tuntas pada tahun 2003/2004. Namun karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997 maka target tersebut tidak tercapai sehingga mengalami perubahan menjadi tahun 2008/2009.

Ketuntasan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di setiap propinsi sangat bervariasi tergantung dari kondisi geografis dan kultural serta kesadaran masyarakat pada daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Buton khususnya Dinas Pendidikan Nasional telah berupaya semaksimal mungkin agar wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dapat berjalan lancar dan sukses sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilihat dengan arah kebijakan pemerintah dalam membangun program fisik seperti pembangunan gedung sekolah mulai dari TK, SD, SMP maupun SMA serta Kantor UPTD sebanyak 453 unit, dengan rincian sebagai berikut TK 128 unit, SD 255 unit, SMP 39 unit, SMA 28 unit, SMK 3 unit dan Kantor UPTD sebanyak 12 unit (Diknas Kabupaten Buton : tahun 2007)

Selain bertambahnya jumlah bangunan di atas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton khususnya pada tingkat SMP sudah menunjukkan kualitas yang cukup baik, dimana persentase kelulusan tahun pelajaran 2007/2008 diperoleh rata-rata 80, 27 % sedangkan tahun pelajaran 2006/2007 hanya 73, 68 % (Diknas Kabupaten Buton . 2007). Di samping pembangunan fisik, pembangunan non-fisik juga menjadi perhatian utama, seperti pembinaan KKG, MGMP, MKKS, KKPS, seleksi guru, kepala sekolah maupun pengawas yang berprestasi dan lain-lain.

Berdasarkan fenomena di atas dapat dikatakan bahwa program pemerintah tentang pencaanangan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun hampir telah sukses dan tercapai sesuai yang diharapkan tetapi itu untuk menyediakan sarana dan prasarana tetapi untuk ukuran kualitas dan kompetensi masih perlu ditangani dengan serius karena akan muncul persoalan baru yang perlu dikaji dan ditelaah secara

bersama khususnya bagi para praktisi pendidikan, bagaimana dengan output pendidikan dasar sembilan tahun, karena terkadang kualitas pendidikan dikesampingkan, misalnya anak yang kemampuan akademiknya kurang, tetapi dinaikan atau diluluskan karena dalam rangka menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Di sisi lain adanya program baru (paket A, B, dan SMP Terbuka atau yang sejenisnya), juga dapat mematikan motivasi belajar anak, karena anak berasumsi bahwa kalau saya tidak naik kelas atau lulus masih ada paket A, B, atau SMP Terbuka untuk mengikuti ujian akhir dan pasti lulus dan memperoleh STTB atau Surat Keterangan yang memiliki legitimasi yang sama dengan output SLTP reguler atau negeri, karena STTB atau surat keterangan yang diperoleh bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (SMA/SMK atau yang sederajat) sehingga tidak heran jika ditemukan beberapa siswa SLTA Di Kabupaten Buton yang memiliki kualitas dan kompetensi yang rendah serta moral yang kurang baik dan jauh berbeda dengan siswa yang lain dikelasnya (Dinas Diknas Kabupaten Buton : 2007)

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka penulis mencoba mengikat suatu Judul “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan pada Kabupaten Buton .“

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Efektivitas Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pemerintah tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pemerintah tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak terkait, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berhubungan dengan kebijakan publik tentang studi pengembangan pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah

Kabupaten Buton dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di daerah khususnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan pendidikan Kabupaten Buton dalam rangka pengembangan wajib belajar sembilan tahun.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi (rujukan) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian serupa khususnya berkaitan dengan topik kebijakan pendidikan sembilan tahun.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektifitas

Dalam memberikan pengertian tentang efektifitas setiap orang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan kepentingan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Chung dan Maginson (1981 ; 24) bahwa ” *Effectiveness means different people.* ” Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999 ; 25) Efektivitas berasal dari kata dasar efek dan efektif. Efek berarti akibat atau pengaruh, efektif berarti dapat membawa hasil atau berhasil guna. Jadi efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dalam suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dengan hasil yang maksimal.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa efektifitas berkaitan dengan terlaksananya tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif bagi anggota. Masalah efektifitas sangat berkaitan dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

Efektifitas kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dapat dilihat berdasarkan teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem, kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan siklus input, proses dan output, tidak hanya output atau hasil tetapi harus mencerminkan hubungan timbal balik antara kebijakan program wajib belajar pendidikan dasar

sembilan tahun dengan lingkungan masyarakat yang ada, sedangkan kriteria efektivitas berdasarkan teori dimensi waktu dapat dilihat dalam kurun waktu tertentu seperti jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Kriteria efektifitas jangka pendek untuk menunjukkan hasil kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan kriteria kepuasan, efisiensi dan produksi. Efektifitas jangka menengah dalam waktu sekitar lima tahun, dengan kriteria perkembangan serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dalam perusahaan atau organisasi. Sementara efektifitas jangka panjang adalah untuk menilai waktu yang akan datang (diatas lima tahun) digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kemampuan untuk membuat perencanaan strategis bagi kegiatan kedepan.

Gibson, *et al.* (Agus Dharma, 1985 : 25) mengatakan, "Efektifitas pekerjaan dalam suatu organisasi ditentukan tiga komponen yaitu: 1) keefektifan individu, seperti keahlian, pengetahuan, sikap, motivasi dan stress; 2). Keefektifan kelompok, seperti kepaduan, kepemimpinan, struktur, status, peranan dan norma-norma; 3) Keefektifan organisasi, seperti lingkungan, teknologi, pilihan strategis, struktur, proses dan kebudayaan."

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa efektifitas adalah proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan seseorang, kelompok atau organisasi dengan memperoleh hasil yang maksimal dalam jangka waktu tertentu berdasarkan norma-norma dan aturan serta kriteria yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Thomas mengemukakan (Mulyasa, 2007 : 83), melihat efektifitas pendidikan dalam kaitannya dengan produktivitas, berdasarkan tiga dimensi yaitu :

1. *The administrator production function*

Produktifitas sekolah dilihat dari segi keluaran administrasi, yaitu seberapa besar dan baik layanan yang dapat diberikan dalam suatu proses pendidikan, baik oleh guru, kepala sekolah maupun pihak lain yang berkepentingan.

2. *The psychologist's production function*

Produktifitas sekolah ditinjau dari segi keluaran, perubahan perilaku yang terjadi para peserta didik, dengan melihat nilai-nilai yang diperoleh peserta sebagai suatu gambaran dari prestasi akademik yang dicapainya dalam periode belajar tertentu di sekolah

3. *The economic's production function*

Produktifitas sekolah ditinjau dari segi keluaran ekonomis yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan pendidikan di sekolah.

Di sisi lain Lipham dan Hoeh (Mulyasa, 2007 : 83) melihat efektifitas suatu kegiatan dari faktor pencapaian tujuan, yang memandang bahwa efektifitas berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama bukan pencapaian tujuan pribadi. Suatu organisasi dan lembaga atau sekolah dikatakan efektif jika tujuan bersama dapat dicapai, dan belum bisa dikatakan efektif meskipun tujuan individu yang ada didalamnya dapat dipenuhi.

Sejalan dengan itu, Steer (Mulyasa, 2007 : 83) mengungkapkan bahwa ukuran efektifitas adalah bagaimana organisasi melakukan seluruh tugas pokoknya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Efektifitas dapat dijadikan barometer untuk

mengukur keberhasilan pendidikan, dengan menggunakan dua istilah, yaitu validasi dan evaluasi.

Menurut Rae (Mulyasa, 2007 : 84) mengemukakan bahwa validasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu intern dan ekstern. Validasi intern merupakan serangkaian test dan penilaian yang dirancang untuk mengetahui secara pasti apakah suatu program pendidikan telah mencapai sasaran yang telah ditentukan, sedangkan validasi eksternal merupakan serangkaian tes dan penilaian yang dirancang untuk mengetahui secara pasti apakah sasaran perilaku dari suatu program pendidikan secara intern telah valid. Disisi lain, Firman (Mulyasa, 2007 : 84) mengatakan bahwa evaluasi dapat digunakan untuk mengukur tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Selanjutnya ditegaskan bahwa evaluasi yang baik dilaksanakan apabila didasarkan pada rencana yang baik pula. Oleh karena itu kegiatan evaluasi dalam kaitannya dengan efektifitas harus mengukur untung rugi, tidak hanya mengukur pencapaian sasaran belaka.

Pekerjaan seseorang dapat dikatakan efektif jika dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, atau sudah mampu mewujudkan tujuan organisasi dalam aspek yang dikerjakan. Pada hakekatnya efektifitas organisasi bukanlah efektifitas pribadi, melainkan efektifitas manajer, dan manajer yang efektif akan menghasilkan manajemen yang efektif.

Engkoswara (Mulyasa, 2007 : 85) mengemukakan bahwa keberhasilan manajemen pendidikan adalah produktifitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi atau efektifitas dan pada efisiensi. Aspek efektifitas dapat dilihat pada masukan yang merata, keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, ilmu dan keluaran

yang gayut dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, pendapatan tingkat penghasilan lulusan, serta alumnus yang memadai.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996 : 36) mengidentifikasi efektifitas sekolah dalam dua kelompok, yaitu efektifitas internal dan efektifitas eksternal. Efektifitas internal menunjuk pada keluaran pendidikan yang tidak diukur secara moneter, seperti prestasi belajar dan jumlah lulusan. Sedangkan efektifitas ekstern menunjuk pada keluaran yang bersifat moneter seperti tingkat penghasilan lulusan.

Indikator efektifitas dalam dunia pendidikan tidak hanya mengacu apa yang ada (*input, process, output* dan *outcome*) tetapi juga pada apa yang terjadi atau proses.

Ada beberapa indikator efektifitas yang menjadi barometer keberhasilan pendidikan yaitu :

1. *Indikator input*, meliputi karakteristik guru, perlengkapan dan materi pendidikan serta kapasitas manajemen.
2. *Indikator proses*, meliputi perilaku administratif, alokasi waktu guru, dan alokasi waktu peserta didik.
3. *Indikator output*, meliputi hasil-hasil yang diperoleh peserta didik, dinamika sistem sekolah, hasil-hasil yang berhubungan dengan prestasi belajar, perubahan sikap, keadilan dan kesamaan.
4. *Indikator outcome*, meliputi jumlah lulusan ketingkat pendidikan berikutnya, prestasi belajar di sekolah yang lebih tinggi, pekerjaan dan pendapatan.

Selain indikator tersebut efektifitas organisasi atau lembaga pendidikan menurut Sergiovanni (Mulyasa, 2007 : 85), juga ditentukan beberapa indikator berikut yaitu :

1. Efektifitas keseluruhan, berhubungan dengan bagaimana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya.
2. Kualitas, menyangkut jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi.
3. Produktivitas, menyangkut volume produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi. Produksifitas dapat diukur dari tiga tingkatan, yaitu tingkat individu, kelompok, dan keseluruhan organisasi.
4. Kesiagaan, berhubungan dengan penilaian menyeluruh tentang kemungkinan bahwa orgnisasi mampu menyelesaikan suatu tugas khusus dengan baik jika diminta.
5. Efisiensi, mencerminkan perbandingan beberapa aspek prestasi unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
6. Laba atau penghasilan, berkaitan dengan penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan organisasi dilihat dari sudut pandang sipemilik.
7. Pertumbuhan ; berkaitan dengan penambahan, seperti tenaga kerja, fasilitas, harta penjualan, laba, bagian pasar dan beberapa penemuan baru.
8. Pendaayagunaan lingkungan, berkaitan dengan batas keberhasilan organisasi organisasi berintegrasi dengan lingkungannya, memperlihatkan sumber daya yang langka dan berharga untuk efektifitas operasional.
9. Stabilitas, berkaitan dengan pemeliharaan struktur , fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.

10. Perputaran atau keluar masuknya pekerja atau siswa, menyangkut frekuensi atau jumlah siswa yang keluar (*drop out* atau mutasi)
11. Semangat kerja, berkaitan dengan kecenderungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
12. Motivasi, berkaitan dengan kekuatan kecenderungan seorang individu melibatkan diri dalam kegiatan dan bersedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.
13. Kepuasan, berkaitan dengan tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan dan dalam organisasi.
14. Penerimaan tujuan organisasi, berkaitan dengan diterimanya tujuan oleh setiap pribadi atau unit-unit dalam organisasi karena mereka percaya bahwa tujuan tersebut benar dan layak.
15. Keluwesan dan adaptasi, berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mengubah prosedur standar operasi jika lingkungan berubah, untuk mencegah kebekuan ransangan lingkungan.
16. Penilaian oleh pihak luar, menyangkut penilaian organisasi dengan lingkungan, baik menyangkut hubungan individu atau kelompok seperti kesetiaan, kepercayaan pelanggan maupun pemegang saham pada petugas dan masyarakat umum.

B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.

Ada beberapa konsep tentang pengertian kebijakan publik. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mengemukakan beberapa konsep tentang kebijakan publik seperti yang dikutip oleh, M. Irfan Islamy (2005 : 1.3) sebagai berikut :

1. Lasswell dan Kaplan mengatakan, " Kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan yang terarah".
2. Friedrich mengatakan, " Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan - kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu ".
3. Kemudian Anderson mengatakan, " Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu ".
4. Selanjutnya Mac Rae dan Wilde mengatakan, " Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar orang ".

Dari beberapa pengertian kebijakan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang yang dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan kata publik bersifat *universal* dapat berarti rakyat, pemerintah atau negara tergantung pada kepentingan dan masalah yang diteliti.

Selanjutnya penulis dapat mengemukakan beberapa pengertian tentang arti kebijakan publik seperti yang dikutip oleh M. Irfan Islamy (2005 : 1.4) sebagai berikut :

1. *Mac Rae dan Wilde* (1979) mengatakan, "Kebijakan publik adalah serangkaian yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh

penting terhadap sejumlah besar orang”. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan pemerintah dan kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang .

2. *Dye* (1978) mengatakan, ” Kebijakan publik adalah sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan sesuatu ”

Maksudnya pemerintah dalam mengambil keputusan atau memilih sesuatu harus mempunyai tujuan dan kebijakan itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat

3. *Easton* (1953) mengatakan, ” Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) , kepada seluruh warga masyarakat”.

Pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat melaksanakan sesuatu (nilai-nilai kebijaksanaan) kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemerintah adalah merupakan para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah kehidupan setiap hari yang akan bertanggung jawab penuh terhadap kepentingan masyarakat tersebut. Dari beberapa pengertian kebijakan publik di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah, oleh pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu

kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Agustino, 2006 : 139) mengatakan implelementasi kebijakan adalah :

” Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006 : 139) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah : ”Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan,
2. Adanya aktivitas,
3. Adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau saran kebijakan itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Lester dan Stewart Jr, (Agustino, 2006 : 139) dimana mereka mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diraih.

Begitu pula yang dikemukakan oleh, M. Gringle (Agustino, 2006 : 140) mengatakan : "Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai".

Sedangkan Chief J. O. Udoji (Agustino, 2006 : 140), mengatakan : "Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan".

Oleh sebab itu implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu : pendekatan *top down* dan *bottom up*. Dalam bahasa Lester dan Stewart (2000 : 108) istilah itu

disamakan dengan *the command and control approach* dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*).

Pendekatan *top down* dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga memerlukan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dinilai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah diterapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur atau birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Menurut Agustino, (2006 : 138 -161), ada beberapa penganut aliran *top down* , diantaranya adalah : *Donald Van Metter* dan *Carl Van Horn*, *Daniel Mazmanian* dan *Paul Sabatier*, *George Edward III*, serta *Merilee S. Grindle*.

Dari beberapa penganut pendekatan implementasi kebijakan *top down* tersebut penulis dapat menjelaskan sebagai berikut :

a. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan *top down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan langsung berhubungan dengan berbagai variabel.

Menurut Van Metter dan Van Horn, (Agustino, 2006 : 138) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial kultural yang mengada dilevel pelaksana kebijakan.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya manusia, finansial dan waktu, karena ketiga sumber daya dimaksud sangat menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya.

4. Sikap / Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal.

b. Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian

Model implementasi yang ditawarkan disebut *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Daniel (Agustino, 2006 : 139) mengklasifikasikan tiga kategori variable yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu :

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang Akan Digarap, meliputi :

- Kesukaran-kesukaran teknis
- Keberagaman perilaku yang diatur
- Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.
- Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara yaitu :

- Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan resmi yang akan dicapai.
- Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
- Ketetapan akolasi sumberdana
- Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga atau instansi pelaksana.
- Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.
- Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.
- Akses formal pihak-pihak luar.

3. Variabel-Variabel di Luar Undang-Undang yang mempengaruhi Implementasi

- Kondisi sosial ekonomi dan teknologi
- Dukungan publik
- Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.
- Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

c. Implementasi kebijakan Publik Model George C. Edward III

Menurut Agustino, (2006 :141 – 145), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu :

1. Komunikasi, artinya komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat , akurat dan konsisten.

Ada tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula atau sebaliknya.
 - b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
 - c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan.
2. Sumber daya, Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan publik. Indikator sumberdaya ada beberapa elemen yaitu :
 - a. Staf, Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan dan kompetensi staf yang mengimplementasikan kebijakan harus kapabel dan berkualitas.

- b. Informasi, Informasi yang memberikan kebijakan maupun yang mengimplementasikan kebijakan harus jelas, begitupula peraturan dan regulasi perintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang, Pelaksana implementasi kebijakan harus diberikan kewenangan sehingga memperoleh kekuatan hukum dan legitimasi.
- d. Fasilitas, Fasilitas pendukung sarana dan prasana sangat penting bagi pengimplementasi kebijakan sehingga semua aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan baik.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat penting karena seorang pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan sehingga dalam pratikumnya tidak terjadi bias.

Menurut George C. Edward III ada beberapa variabel disposisi yang perlu dicermati yaitu :

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi, oleh sebab itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Insentif, pelaksana kebijakan perlu diberikan insentif yang memadai agar dapat bekerja secara maksimal

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Menurut Edward III, yang dapat mendokrat kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Prosedurs (SOPs)* dan melaksanakan *Fragmentasi*. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pada setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan, sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

d. Implementasi Kebijakan Publik Menurut Model Merilee S. Grindle.

Implementasi kebijakan publik model Merilee biasa disebut dengan pendekatan *Implementation as A Political and Administrative Process*.

Menurut Grindle (Agustino, 2006 ; 140) ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :

1. Dilihat dari segi prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Menurut Grindle (Agustino, 2006 ; 127) keberhasilan suatu implementasi kebijakan amat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari : *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

- a. *Content of Policy*, meliputi : *Interest Affected* (kepentingan yang mempengaruhi), *Type of Benefits* (tipe manfaat), *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan), *Program Implementer* (pelaksana program), *Resources Committed* (sumber daya yang digunakan).
- b. *Context of Policy*, meliputi : *Power, Interest and Strategy of actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat), *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Di sisi lain Grindle (Agustino, 2006 : 127) ada beberapa faktor penentu dilaksanakan tidaknya suatu kebijakan publik yaitu sebagai berikut

- a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan, yang terdiri dari :
 1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
 2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
 3. Adanya sanksi hukum
 4. Adanya kepentingan publik
 5. Adanya kepentingan pribadi
 6. Masalah waktu

- b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan, terdiri dari :
1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada
 2. Tidak adanya kepastian hukum
 3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
 4. Adanya konsep ketidakpuasan selektif terhadap hukum

C. Konsep Implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Menurut Langeveld (Kartono, 1997 : 68) pendidikan adalah ” usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar ia bisa mandiri, akil baliq dan bertanggung jawab secara susila. Selanjutnya Kartono (1997 ; 68) mengatakan ” Pendidikan adalah segala perbuatan yang etis, kreatif, sistematis, interpersonal dibantu dengan metode ilmiah yang diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu .”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional (Bab I , Pasal 1) dijelaskan bahwa :

”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat , bangsa dan negara.”

Pada pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa : ” wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung

jawab Pemerintah dan pemerintah Daerah.” Sedangkan pada pasal 17 dijelaskan bahwa :

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang mendasari jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat .

Pencangan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1994, berdasarkan Instruksi Presiden No : I Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang pada hakkekatnya merupakan Instruksi Presiden kepada : 1. Menko Bidang Kesra, 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 3. Menteri Dalam Negeri, 4. Menteri Keuangan, sebagai Gerakan Nasional tertnung sejak tahun pelajaran 1994/1995.

Oleh sebab itu dalam rangka menyukseskan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar tersebut maka kebijakan pemerintah lebih diarahkan pada penuntasan program pendidikan tiga tahun di SLTP atau sederajat, karena program pendidikan dasar enam tahun di Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dianggap telah tuntas walaupun pada kenyataannya masih perlu pembinaan secara berkesinambungan.

Ketuntasan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di setiap propinsi sangat bervariasi tergantung dari kondisi geogerafis dan kultural serta kesadaran masyarakat pada daerah tersebut. Hal ini sesuai pernyataan Direktur

Jenderal Manajemen pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI, (Bapak Suyanto) disaat rembuk Nasional tentang Pendidikan 2008 di Bogor, bahwa tahun 2007 angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP yang mencapai 95 % sebanyak 187 kabupaten dari 11 provinsi, sedangkan yang masuk kategori tuntas utama 90 – 95 % sebanyak 56 kabupaten dan 5 propinsi ,sementara yang masih berjuang masuk kategori madya pertama karena APK-nya masih kurang dari 80 % adalah sebanyak 111 kabupaten/kota dan 7 propinsi. Sedangkan menurut Menteri Pendidikan Nasional (Bambang Sudibiyono) pada Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2008 mengatakan bahwa angka partisipasi kasar (APK) saat ini telah mencapai 92,52 % sehingga tinggal menuntaskan 2,48 % lagi.

Kondisi ketuntasan wajar pendidikan dasar sembilan tahun disetiap propinsi dapat dijelaskan bahwa ada lima propinsi yang APK tertinggi yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Timur dan Nanggroe Aceh Darussalam, sedangkan lima propinsi yang APK terendah adalah NTT, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat.

Selanjutnya menurut Suyanto (Direktur Jenderal Manajemen pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI) untuk kabupaten dan kota yang paling tinggi APK-nya adalah Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Magelang (Jawa Tengah), Kota Cilegon (Banten) , Kota Palopo (Sulawesi Selatan), Kota Jakarta Selatan , Kota Palangkaraya (Kalimantan Tengah), Kota Bukit Tinggi (Sumatra Barat) , Kota Padang Sidempuan (Sumatra Utara), selain itu masih terdapat pula kabupaten / kota yang terendah APK-nya adalah Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah), Kabupaten Sumarta Barat (NTT), Kabupaten Dongkala (Sulawesi Tengah),

Teluk Bintuni, Kabuapten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo (Papua), Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi (Papua Barat) dan Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat).

Sedangkan untuk Propinsi Sulawesi Tenggara dan propinsi lain yang tidak disebutkan di atas maka dikategorikan sebagai Propinsi dan kabupaten/kota yang APK-nya menengah, termasuk Kabupaten Buton APK untuk tingkat SLTP baru mencapai 78,69 % (Data Subdin Perencanaan Diknas Kabupaten Buton , Maret 2007)

D. Konsep Kualitas Pendidikan dan Indikatornya

Pendidikan yang bermutu dalam arti luas dapat dipahami sebagai pendidikan yang menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Bahkan menurut Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu menurut E. Mulyasa (2006 : 5) mengemukakan bahwa dua kebijakan pokok yang telah ditetapkan pemerintah untuk mendongkrak kualitas pendidikan melalui “gerakan peningkatan mutu pendidikan”. Gerakan ini juga dapat menumbuhkan kecakapan anak didik sesuai dengan kebutuhan lokal dan perspektif global (*act locally, think globally*). Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut dikaitkan peningkatan mutu pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, hal yang menyangkut efisiensi pengelolaan pendidikan pemerintah telah menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Kedua, untuk lebih memacu akselerasi peningkatan mutu, pemerintah juga telah merancang KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi).

Berbeda dengan pendapat di atas, Nana Syaodih Sukmadinata *et al.* (2006 : 1) mengemukakan bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat diukur dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, dapat dilihat dari jumlah lulusan, dan dimensi-dimensi lain. Sebaliknya, dari segi kualitas menurutnya, dapat dilihat dari kualitas lulusan baik kualitas pribadi, moral, pengetahuan maupun kompetensi kerja. Kedua dimensi inilah yang sebenarnya menjadi syarat mutlak dalam kehidupan masyarakat global yang terus berkembang. Oleh karena itu, dalam merealisasikan pendidikan yang bermutu, dituntut penerapan program mutu yang terfokus pada upaya penyempurnaan mutu komponen dan kegiatan pendidikan.

Berkaitan dengan penyempurnaan mutu seluruh komponen dan kegiatan pendidikan, para ilmuwan mencoba meramunya sehingga tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat dicapai. Salah satu ilmuwan yang mengembangkan model peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan komponen-komponen pendidikan tersebut antara lain adalah Nana Syaodih Sukmadinata *et al.* (2006 : 8) yang mengemukakan bahwa mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan berbagai peningkatan mutu komponen pendidikan. Mutu komponen pendidikan yang dimaksudkan menurutnya meliputi : mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan guru, mutu profesionalisme dan kinerja guru. Selain itu, mutu komponen pendidikan yang tidak kalah penting adalah mutu manajerial para pemimpin pendidikan, dana (anggaran) pendidikan, mutu sarana dan prasarana, mutu fasilitas pendidikan, mutu media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait.

Di sisi lain, Nana Syaodih Sukmadinata *et al.* (2006 : 8) juga menyoroti bahwa mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti lulusan tidak dapat melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan studinya pada jenjang yang lebih tinggi, tidak dapat bekerja, tidak diterima di dunia kerja, diterima bekerja, tetapi tidak berprestasi, tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan tidak produktif. Lulusan yang tidak produktif akan membebani masyarakat, menambah biaya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta memungkinkan menjadi warga yang tersisih dari masyarakat.

Jika para ahli pendidikan di atas menyoroti masalah mutu pendidikan secara komprehensif dan tuntas dengan menggunakan indikator mutu pendidikan mulai dari lulusan sampai pada indikator sarana dan prasarana, maka menurut Dedi Supriadi (2004 : 96) melihatnya dari indikator NEM (Nilai Ebtanas Murni) yang dicapai oleh siswa sebagai salah satu indikator terhadap mutu pendidikan. Menurutnya, dengan melihat mutu pendidikan tingkat SD di Indonesia, maka tampak mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari segi rata-rata NEM (Nilai Ebtanas Murni) yang diperoleh siswa. Menurutnya pula bahwa hanya sekitar 10 persen SD yang tergolong bermutu baik. Masih rendahnya rata-rata mutu SD akan berpengaruh pada mutu pendidikan di jenjang SLTP dan SLTA. Mutu pendidikan juga menunjuk pada efisiensi eksternal, yaitu sejauhmanakah hasil belajar siswa di sekolah relevan dengan tuntutan belajar pada jenjang selanjutnya dan dengan kebutuhan hidupnya sebagai anggota masyarakat. Mutu yang rendah berarti juga efisiensi eksternal yang rendah.

Dikaitkan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, Dedi Supriadi (2004 : 97) mengemukakan bahwa pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun bertujuan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia Indonesia melalui peningkatan rata-rata pendidikannya hingga minimal setara SLTP. Sejak dimulai pada tahun 1994, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah mencapai banyak kemajuan. Indikator-indikator kuantitatif yang dicatat menunjukkan bahwa APK meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya ruang belajar, jumlah guru, dan fasilitas belajar lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Dwiyanto et al. (2003 : 149) ditemukan bahwa indikator untuk melihat mutu pendidikan dapat dilihat dari kesiapan sekolah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah mengenai Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMPBS). Data yang ditemukan menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan di berbagai daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terlihat belum siap melaksanakan kebijakan mengenai Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMPBS). Hal ini terlihat dari masih belum transparannya Dinas Pendidikan dalam merumuskan berbagai kebijakan atau program dasar untuk kepentingan pelayanan pendidikan. Pada kasus program pengadaan buku teks wajib bagi sekolah, misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dinilai oleh pihak sekolah tidak transparan sehingga berbagai praktik KKN antara Dinas Pendidikan dengan pihak penerbit buku masih seringkali dijumpai.

Pendapat yang berbeda dari para ahli pendidikan di atas dikemukakan oleh Achmad Slamet (2006 : 87-88) yang mengemukakan bahwa sebaiknya keberhasilan pendidikan formal tidak hanya dilihat dari mutu lulusan berdasarkan prestasi belajar

semata, yang lebih penting adalah setiap lulusan pendidikan formal seharusnya memenuhi standar kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, perluasan pendidikan formal hendaknya mempertimbangkan keuntungan ekonomi lulusan guna memperoleh penghasilan dari hasil kerjanya pada masa depan sepanjang hidupnya. Selain itu, keberhasilan pendidikan formal juga diukur dari kebermaknaan keuntungan non ekonomi untuk meningkatkan kapabilitas individu lulusannya dalam mengembangkan perilaku produktif, perilaku sehat, perilaku dalam kehidupan keluarga, perilaku berpartisipasi sebagai warga negara dan perilaku berbudaya.

Sebagai sebuah sistem, peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari berbagai komponen pendidikan. Menurut Umaedi sebagaimana dikutip oleh Kadir (2004 : 79) mengemukakan bahwa hasanah pembangunan sektor pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan, tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. *Input* pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu, tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan (*school resources are necessary but not sufficient condition to improve student achievement*).

Sejalan dengan pendapat di atas, Kadir (2004 :79) mengemukakan bahwa di satu sisi peningkatan mutu pendidikan akan dapat dicapai apabila melibatkan banyak komponen diantaranya : sarana dan prasarana penunjang, siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai fasilitator, motivator, dan mitra konsultasi bagi siswa. Ini semua dapat dicapai apabila didukung oleh berbagai pihak, terutama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah yang kondusif, dan pemerintah sebagai penentu kebijakan.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan dapat diukur dengan dua aspek, yaitu aspek akademik yang memuat nilai UAN, hasil UMPTN, karya ilmiah, dan prestasi lomba akademik dan aspek non akademik yang menyangkut prestasi olah raga, kesenian, kerajinan, kedisiplinan, dan kegiatan ekstra kurikuler. Selengkapnya mengenai indikator untuk mengukur mutu pendidikan dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Hubungan Mutu Pendidikan dan *Output* Lulusan (Kadir, 2004 : 25)

Berkaitan dengan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan, menurut Kadir (2004 : 81) mengemukakan bahwa faktor yang turut mempengaruhi mutu pendidikan adalah sebagai berikut,

1. Mutu masukan (*raw input*), yaitu siswa baru untuk jalur sekolah dan warga belajar bagi jalur luar sekolah.
2. *Instrumental input*, yang terdiri atas kepala sekolah, tenaga edukatif dan staf, sarana dan prasarana, kurikulum, dan manajemen pengelolaan sekolah.

3. *Environmental input* yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan sekolah (kondisi sosial dan ekonomi, budaya, dan letak geografis).
4. Proses pelaksanaan pendidikan yang bermutu terkait dengan pemberdayaan secara optimal.
5. Peranan optimal dari tugas pengawasan, baik pihak pengawas intern (pengawasan oleh pimpinan/atasan langsung) maupun pengawasan ekstern.

Dengan demikian, menurut Kadir (2004 : 80-81) ada tiga agenda yang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu/kualitas pendidikan, yaitu :

1. Agenda intelektual yang berkaitan dengan penetapan visi, misi, dan strategi pendidikan.
2. Agenda *behavioral* berkaitan dengan perubahan nilai, norma, etika, perilaku, pola kepemimpinan, budaya, dan pembelajaran.
3. Agenda *managerial* mencakup perubahan struktural organisasi dan jaringan kerja, pengalokasian sumberdaya, akses terhadap masyarakat.

Berkaitan dengan kualitas pendidikan yang dilihat dari aspek kompetensi peserta didik, maka Gordon (Mulyasa, 2006 : 38-39) mengemukakan bahwa ada beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu : (a) pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, (b) pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif, (c) kemampuan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik, (d) nilai (*value*), yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, (e) sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka atau tidak suka) atau reaksi terhadap rangsangan yang datang dari luar, misalnya reaksi terhadap krisis

ekonomi, dan (f) minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.

Menurut Zamroni (2001 : 10) ada tiga aspek dasar yang direformasi dalam peningkatan kualitas pendidikan yaitu aspek regulatori, aspek profesionalisme dan aspek manajemen. Ketiga aspek tersebut amat diperlukan agar dapat menciptakan kondisi sekolah yang memungkinkan peserta didik dapat menemukan jati dirinya, serta dapat memahami interes dan dapat sepenuhnya mengembangkan bakatnya, sehingga dapat mengambil keputusan secara nasional tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya demi kepentingan diri, keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Di sisi lain Slamet (2006 : 75-76) mengemukakan bahwa secara sistematis pengelolaan pendidikan terdiri dari berbagai komponen yaitu : *input*, proses, *output* dan manfaat atau *benefit*.

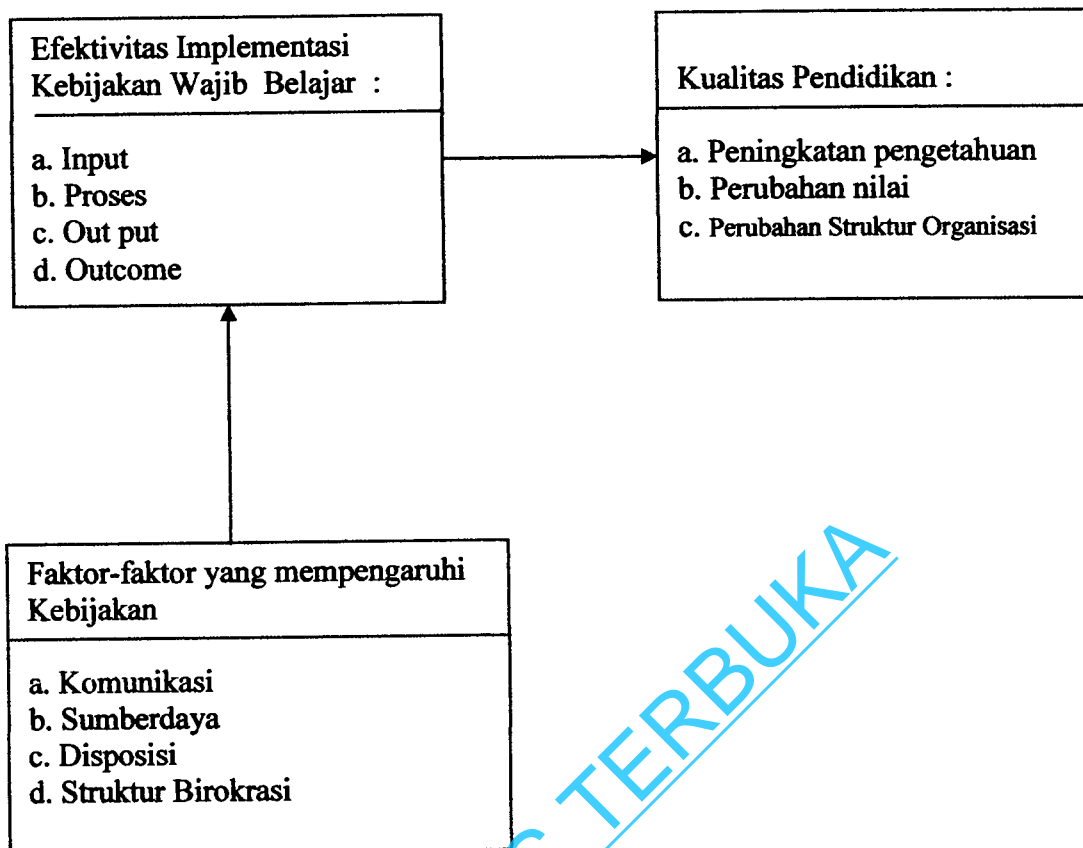
Lebih lanjut Slamet (2006 : 75-76) menjelaskan bahwa *input* pendidikan akan meliputi kondisi : (a) fisiologis, seperti : visi, misi dan tujuan pendidikan, (b) manusia, seperti : peserta didik, guru, administrasi dan lainnya, (c) fisik, seperti : gedung sekolah, peralatan dan material yang digunakan untuk proses pendidikan. Proses pendidikan meliputi proses belajar yang melibatkan tujuan dan prioritas, peserta didik, teknologi pendidikan, isi pembelajaran, alat bantu belajar, staf program, fasilitas dan perlengkapan dan jadwal. *Output* pendidikan meliputi perolehan kualitas pengetahuan, keterampilan, sikap dan pemahaman, kualitas dan kuantitas lulusan sekolah, prosentase lulusan, lulusan yang lanjut kejenjang yang lebih tinggi dan lulusan yang mendapatkan pekerjaan. Manfaat (*benefit*) pendidikan meliputi aspek-

aspek peningkatan pendapatan, perilaku produktif, perilaku sehat, keharmonisan kehidupan keluarga, perilaku berbudaya dan partisipasi sebagai warga negara.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya maka penulis dapat menjelaskan bahwa kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengacu pada beberapa konsep pemikiran yang dikemukakan oleh para pakar yakni ; ektivitas implementasi wajib belajar 9 tahun mengacu pada pendapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RI, konsep kualitas pendidikan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kadir sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George Edward III. Untuk lebih jelaskan kerangka pemikiran dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA



Gambar 2. Kerangka Berpikir

F. Definisi Operasional

1. Efektivitas implementasi kebijakan wajib belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah terhadap pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun disetiap SLTP.
2. Kualitas pendidikan adalah hasil dan manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar yang dapat dilihat melalui nilai hasil ujian nasional dan persentase kelulusan sekolah.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi wajib belajar sembilan

Tahun adalah hal-hal yang dapat menentukan berhasil tidaknya atau efektif tidaknya kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar sembilan tahun yang dapat diukur melalui komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III.

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yakni menganalisis fenomena terhadap berbagai masalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah, khususnya mengenai efektifitas kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton. Secara kualitatif pula dapat digambarkan bahwa kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun merupakan variabel bebas (*independent variable*), sedangkan kualitas pendidikan merupakan variabel terpengaruh (*dependent variable*). Dengan demikian, penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif yang memfokuskan pada keberadaan berbagai faktor (variabel) yang mempengaruhi efektifitas kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton, khususnya di jenjang pendidikan SMP.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola pendidikan yang terlibat dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Buton. Adapun jumlah sampel pengelola dan pihak-pihak yang terlibat sejumlah 50 responden yang terdiri dari : Kepala Dinas , Sekretaris Dinas, 2 orang Kasubdin, 1 orang Kepala Seksi, 15 orang Kepala Sekolah, 15 orang Wakil Kepala Sekolah, 15 Ketua Komite. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penulis menetapkan sekolah

yang menjadi sasaran penelitian berdasarkan zona, yakni Wilayah Daratan Buton, Wilayah Kepulauan Buton dan Wilayah Daratan Muna

C. Informan Penelitian

Selain pengelola pendidikan yang terlibat dalam pengelolaan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Buton, untuk melakukan penggalian informasi yang mendalam dan sekaligus sebagai bentuk triangulasi data. Penelitian ini melibatkan informan penelitian, seperti pemuka masyarakat, tokoh pendidikan, Dewan Pendidikan Kabupaten Buton, LSM, dan pakar pendidikan yang ada di Kabupaten Buton.

D. Instrumen Penelitian

Untuk menggali dan memperoleh informasi, penelitian ini menggunakan instrumen penelitian, yaitu kuesioner (angket), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi. Kuesioner (angket) diberikan kepada pengelola yang terlibat dalam pengelolaan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, sedangkan wawancara akan digunakan untuk menggali informasi dari informan kunci (*key informan*), seperti kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, ketua dewan pendidikan, ketua komite sekolah, pemuka masyarakat, LSM, pakar pendidikan.

E. Prosedur Pengumpulan Data

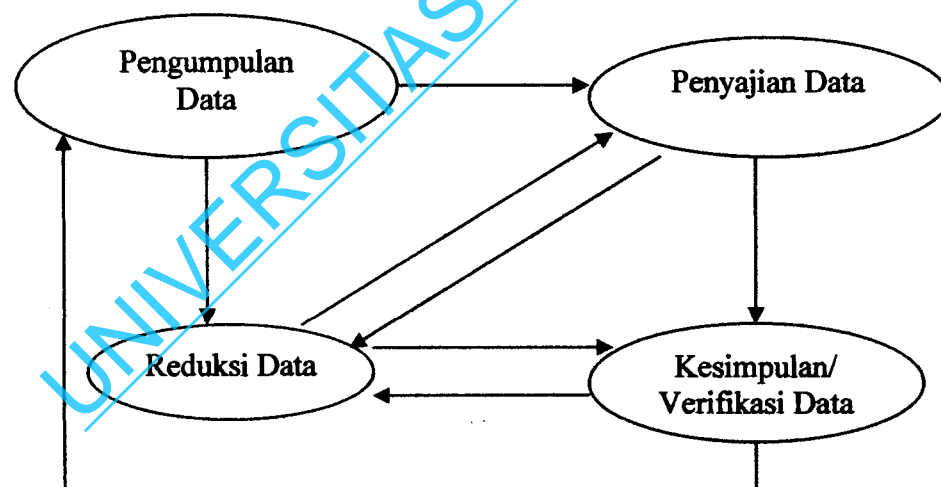
Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik yaitu pengumpulan data dokumentasi melalui *library research* (penelitian kepustakaan) dan pengumpulan data di lapangan melalui *field research* (penelitian lapangan) melalui dokumentasi, observasi, angket (kuesioner), dan wawancara

mendalam (*indepth interview*). Untuk melakukan kros cek data, peneliti tetap menggunakan triangulasi data (pengecekan keabsahan data).

F. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tabel prosentase, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan saling berhubungan dengan yang lainnya, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan kata lain, ketiga model analisis tidak perlu berurutan, melainkan tergantung pada kebutuhannya. Analisis ini sudah berlangsung sejak tahap pengumpulan data (Miles dan Huberman, 1992 : 73). Analisis seperti ini termasuk di dalamnya adalah penggunaan metode interpretasi sebagai konsekuensi untuk data kualitatif.

Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar : 3 Rancangan Analisis Data

Untuk memudahkan dalam analisis data maka setiap option angket responden diberi skor : A = 4, B = 3, C = 2, D = 1 dan E = 0 (Sarbiran, 1988 : 69).

Berdasarkan skor di atas maka selanjutnya dapat ditransformasi dalam bentuk nilai sebagai berikut :

1. Skor	81	-	100	=	A	=	Sangat efektif
2. Skor	61	-	80	=	B	=	Efektif
3. Skor	41	-	60	=	C	=	Cukup efektif
4. Skor	21	-	40	=	D	=	Kurang efektif
5. Skor	0	-	20	=	E	=	Tidak Efektif

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton

Sebelum penulis penguraikan gambaran umum Dinas Pendidikan Nasional maka terlebih dahulu menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Buton. Kabupaten Buton memiliki posisi yang sangat strategis, karena terletak pada jalur pelayanan nasional Indonesia yang sangat berpotensi sebagai pintu gerbang pelabuhan Propinsi Sulawesi Tenggara untuk kawasan Timur Indonesia (KTI) yang berfungsi sebagai kawasan penyangga Kota Bau-Bau sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan tepat.

Sebelum tahun 2001 Kabupaten Buton merupakan sebuah kabupaten besar yang wilayahnya terbentang mulai dari sebagian daratan pulau Sulawesi, pulau Kabaena (sekarang menjadi wilayah Kabupaten Bombana), sebageian daratan Pulau Muna, Pulau Buton hingga Kepulauan Tukang Besi (sekarang menjadi pulau Wakatobi).

Kabupaten Buton terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan antara $4,96^{\circ}$ - $6,25^{\circ}$ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara $120,00^{\circ}$ - $123,34^{\circ}$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut,

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muna, dan Kabupaten Buton Utara.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi dan Propinsi Maluku
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bombona

Kabupaten Buton terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, yang tersebar di Pulau Buton, Pulau Muna dan beberapa kepulauan. Kecamatan-kecamatan yang berada di pulau Buton adalah Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Siontapina, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Batauga, Kecamatan Kapontori, Kecamatan Lampandewa dan Kecamatan Lapandewa dan Kecamatan Wabula. Kecamatan yang berada di Pulau Muna adalah Kecamatan Sangia Mambulu, Kecamatan Lakudo, Kecamatan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Gu. Sedangkan kecamatan yang ada di kepulauan yaitu Kecamatan Bata Atas, Kecamatan Kadatua, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat dan Kecamatan Talaga Raya.

Dari gambaran umum kondisi Kabupaten Buton tersebut maka dapat dijelaskan bahwa letak geografis dan rentang kendali antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya sangat jauh sehingga untuk mengelilingi Wilayah Kabupaten Buton yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan tersebut memerlukan waktu 4 x 24 jam.

Sedangkan untuk gambaran umum Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton adalah pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan kondisi Kabupaten Buton namun yang membedakan hanya tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton terletak di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo dengan jarak 400 meter dengan Kantor Bupati

Buton Bagian Barat, yang terdiri dari 3 unit bangunan dengan luas \pm 1.800 m² ,
sedangkan luas tanah \pm 5.000 m².

Untuk lebih jelasnya keadaan pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton dapat dilihat pada daftar lampiran 1.

Selain data keadaan pegawai Dinas Diknas Kabupaten Buton seperti terlihat pada daftar lampiran 1 di atas penulis perlu menjelaskan pula tentang struktur organisasi yang ada sekarang berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Buton Nomot : 6 Tahun 2007 tanggal 30 Nopember 2007 seperti terlihat pada daftar lampiran : 2.

Selanjutnya penulis perlu menguraikan pula keadaan persekolahan setiap kecamatan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), yaitu sebagai berikut

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.1 Keadaan Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton Tahun 2007

NO	Kecamatan	Jumlah SD/MI/SDLB	Jumlah Siswa	%
01	Pasarwarjo	31	6290	12,49
02	Kapontori	21	4043	8,03
03	Lakudo	19	3926	7,80
04	Mawasangka	20	3861	7,67
05	Sampolawa	16	3729	7,41
06	Gu	15	3043	6,04
07	Siontapina	13	2661	5,28
08	Batuatas	05	2274	4,52
09	Batauga	13	2256	4,48
10	Lasalimu Selatan	17	2240	4,45
11	Talaga Raya	09	2044	4,06
12	Lasalimu	17	1989	3,95
13	Siompu	08	1816	3,61
14	Lapandewa	07	1609	3,20
15	Siompu Barat	06	1580	3,14
16	Mawangka Tengah	07	1344	2,67
17	Kadatua	08	1341	2,66
18	Wabula	06	1228	2,44
19	Wolowa	07	1104	2,19

20	Mawasangka Timur	09	995	1,98
21	Sangia Wambulu	07	988	1,96
	Jumlah	261	50.357	100,00

Sumber : Subdin perencanaan Dinas Diknas Kabupaten Buton tahun 2007

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa SD/MI /SDLB di Kabuapten Buton berjumlah 261 unit dengan jumlah siswa 50.357 orang .

Dari jumlah tersebut tampak bahwa kecamatan yang paling banyak muridnya adalah Kecamatan Pasarwajo sebanyak 6290 orang (12,49 %) , sedangkan paling sedikit muridnya adalah Kecamatan Sangia Wambulu dengan jumlah 988 orang (1,96 %). Hal ini disebabkan Kecamatan Sangia Wambulu merupakan Kecamatan baru atau hasil pemekaran dari Kecamatan Gu sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran SD di Wilayah Kabupaten Buton tidak merata antara kecamatan satu dengan yang lainnya.

Tabel 4.2 Keadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton

No	Kecamatan	Jumlah SMP/MTs	Jumlah Siswa	%
01	Pasarwarjo	4	2.113	18,92
02	Sampolawa	2	791	7,08
03	Batauga	2	644	5,77
04	Mawasangka	1	635	5,69
05	Lapandewa	2	535	4,79
06	Gu	1	515	4,61
07	Talaga Raya	1	512	4,58
08	Kapontori	3	511	4,58
09	Siompu Barat	1	502	4,49
10	Lakudo	5	494	4,42
11	Kadatua	2	494	4,42
12	Lasalimu Selatan	1	449	4,02
13	Batuatas	1	413	3,69
14	Siontapina	1	406	3,64
15	Lasalimu	2	390	3,49
16	Siompu	2	386	3,46
17	Sangia Wambulu	2	382	3,42
18	Mawangka Tengah	1	361	3,23
19	Wolowa	1	256	2,29
20	Wabula	1	207	1,85
21	Mawasangka Timur	1	171	1,53
	Jumlah	37	11.167	100

Sumber : Subdin perencanaan Dinas Diknas Kabupaten Buton

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa unit sekolah SMP/MTs di Kabupaten Buton berjumlah 37 unit dengan total siswa 11.167 orang . Sedangkan jumlah siswa perkecamatan dapat yang paling banyak adalah Kecamatan Pasarwajo

2113 orang (18,92 %), sedangkan paling sedikit siswanya adalah Kecamatan Mawasangka Timur dengan jumlah 171 orang (1,53 %). Hal ini disebabkan Kecamatan Mawasangka Timur merupakan Kecamatan baru atau hasil pemekaran dari Kecamatan Mawasaangka sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran SMP di Wilayah Kabupaten Buton belum merata antara kecamatan satu dengan yang lainnya tergantung jumlah penduduk dan usia sekolah pada kecamatan tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.3 Keadaan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton

NO	Kecamatan	Jumlah SMA/MA	Jumlah Siswa	%
01	Pasarwarjo	4	1.859	28,92
02	Mawasangka	1	599	9,32
03	Gu	1	521	8,11
04	Lakudo	2	490	7,62
05	Batauga	1	465	7,24
06	Kapontori	3	341	5,31
07	Siompu Barat	1	292	4,54
08	Lasalimu Selatan	2	289	4,50
09	Sampolawa	1	222	3,45
10	Sangia Wambulu	1	216	3,36
11	Lapandewa	1	190	2,96
12	Lasalimu	1	152	2,37
13	Wabula	1	155	2,41
14	Talaga Raya	1	130	2,02
15	Wolowa	1	124	1,93
16	Mawasangka Timur	1	89	1,38
17	Mawangka Tengah	1	77	1,20
18	Siompu	1	76	1,18
19	Batuatas	1	61	0,95
20	Siontapina	1	46	0,72
21	Kadatua	1	32	0,50
	Jumlah	28	6.426	100,00

Sumber : Subdin perencanaan Dinas Diknas Kabupaten Buton

Berdasarkan data di atas maka dapat dijelaskan bahwa unit SMA/MA di Kabupaten Buton berjumlah 28 unit dengan total siswa 6.426 orang, sedangkan

jumlah siswa yang terbanyak terdapat pada Kecamatan Pasarwajo yaitu 1859 (28,92 %), sedangkan paling sedikit siswanya SMA dan MA adalah Kecamatan Kadatua dengan 32 (0,50%). Hal ini disebabkan Kecamatan Kadatua merupakan Kecamatan baru atau hasil pemekaran dari Kecamatan Batauga sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran siswa SMA dan MA di Wilayah Kabupaten Buton belum merata antara kecamatan satu dengan yang lainnya tergantung jumlah penduduk dan usia sekolah pada kecamatan tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4. 4 Keadaan Sekolah Menengah Lejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton

NO	Kecamatan	Jumlah SMK	Jumlah Siswa	APK	APM
01	Pasarwarjo	1	63	3,87	3,13
02	Batauga	1	52	2,76	2,56
03	Sampolawa	-	-	-	-
04	Lasalimu	-	-	-	-
05	Kapontori	-	-	-	-
06	Gu	-	-	-	-
07	Mawasangka	-	-	-	-
08	Lakudo	-	-	-	-
09	Lasalimu Selatan	-	-	-	-
10	Mawasangka Timur	-	-	-	-
11	Siompu	-	-	-	-
12	Kadatua	-	-	-	-
13	Talaga Raya	-	-	-	-
14	Batuatas	-	-	-	-
15	Wolowa	-	-	-	-
16	Sangia Wambulu	-	-	-	-
17	Siompu Barat	-	-	-	-
18	Mawangka Tengah	-	-	-	-
19	Wabula	-	-	-	-
20	Siontapina	-	-	-	-
21	Lapandewa	-	-	-	-
	Jumlah		116	3,32	2,85

Sumber : Subdin perencanaan Dinas Diknas Kabupaten Buton tahun 2007

Berdasarkan data di atas maka dapat dijelaskan bahwa unit SMK di Kabupaten Buton berjumlah 2 unit dan hanya terdapat pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan

Pasarwajo dan Kecamatan Batauga dengan total siswa 116 orang. Ini menunjukkan bahwa animo siswa tamatan SLTP untuk masuk di SMK masih sangat kurang, sedangkan jumlah siswa yang terbanyak adalah terdapat pada Kecamatan Pasarwajo yaitu 63 orang (54,31 %) sedangkan Kecamatan Batauga 52 orang (44,87 %).

Selanjutnya penulis perlu memberikan gambaran umum tentang keadaan guru pada tingkatan pendidikan di Kabupaten Buton untuk setiap Kecamatan yaitu sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.5 Keadaan Guru Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton Perkecamatan

No	Kecamatan	Guru Menurut Status Kepegawaian							Jumlah	(%)
		Tetap				Tidak Tetap				
		Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Yaya san	Tidak Tetap	Bantu Pusat	Bantu Daerah		
01	Pasarwarjo	74	83	46	0	130	06	14	353	16
02	Batauga	16	52	37	0	45	02	03	155	6,9
03	Sampolawa	25	64	21	0	30	04	09	153	6,8
04	Lasalimu	17	18	09	0	59	05	05	113	5,0
05	Kapontori	48	48	18	0	49	02	06	171	7,6
06	Gu	25	42	05	0	58	04	03	137	6,1
07	Mawasangka	24	50	23	0	68	06	00	171	7,6
08	Lakudo	12	50	07	0	47	04	05	135	6,0
09	Lasalimu Selatan	25	28	01	0	74	05	06	159	7,1
10	Mawasangka Timur	12	05	00	0	27	00	01	45	2,0
11	Siompu	05	13	19	0	31	01	00	69	3,0
12	Kadatua	05	23	06	0	21	00	00	55	2,5
13	Talaga Raya	17	12	01	0	20	00	01	51	2,3
14	Batuatas	16	02	00	0	23	01	00	42	1,9
15	Wolowa	08	06	01	0	40	02	01	58	2,6
16	Sangia Wambulu	06	23	11	0	34	00	05	79	3,5
17	Siompu Barat	07	12	02	0	33	06	00	60	2,7
18	Mawangka Tengah	08	10	03	0	25	00	01	47	2,1
19	Wabula	06	17	14	0	21	01	01	54	2,4
20	Siontapina	20	27	05	0	45	05	02	104	4,7
21	Lapandewa	08	10	04	0	14	03	06	45	2,0
	Jumlah	390 <i>(17%)</i>	595 <i>(27%)</i>	233 <i>(10%)</i>	0 <i>(0%)</i>	894 <i>(40%)</i>	57 <i>(26%)</i>	73 <i>(3%)</i>	2.236	

Sumber : Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang paling banyak memiliki guru SD adalah Kecamatan Pasarwajo sebanyak 353 orang (16%), kemudian Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Mawasangka masing 171 orang (7,6%) .Hal ini disebabkan ketiga kecamatan tersebut memiliki jumlah sekolah dan

penduduk yang relatif banyak bila dibandingkan dengan kecamatan yang lain di Kabupaten Buton. Sedangkan untuk Kecamatan yang paling sedikit gurunya adalah Kecamatan Batuatas sebanyak 42 orang (1,9 %) kemudian menyusul Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Lapandewa masing-masing sebanyak 45 orang (2,0 %). Hal ini disebabkan ketiga kecamatan dimaksud jumlah penduduk dan sekolah relatif kecil serta jangkauan relatif jauh dengan kecamatan yang lain (terpencil).

Selain hal tersebut penulis dapat menjelaskan pula bahwa keberadaan guru di Kabupaten Buton berdasarkan status kepegawaian 1.024 orang (45,7 %) sebagai guru tidak tetap dan 1.218 orang (54,47%) sebagai guru tetap atau PNS.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.6 Keadaan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton Perkecamatan

No	Kecamatan	Guru Menurut Status Kepegawaian						Jumlah (%)	
		Tetap				Tidak Tetap			
		Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Yaya san	Tidak Tetap	Bantu Pusat		Bantu Daerah
01	Pasarwajo :								
	a. SMPN 1 Pasarwajo		59	08	00	00	00	00	67
	b. SMPN 2 Pasarwajo		27	11	00	07	01	00	46
	c. SMPN 3 Pasarwajo		32	06	00	03	01	00	42
	d. SMPN 4 Pasarwajo		20	00	00	05	00	00	25
	e. SMPN 5 Pasarwajo		08	00	00	00	00	00	08
	Jumlah		146	15	00	15	02	00	188 (19,89)
02	Batauga :								
	a. SMPN 1 Batauga	02	43	05	00	12	04	00	66
	b. SMPN 2 Batauga	00	03	00	00	09	00	00	12
	c. SMPN 3 Batauga	00	03	00	00	05	00	00	08
	Jumlah	02	49	05	00	26	04	00	86(9,10)
03	Sampolawa :								
	a. SMPN 1 Sampolawa	01	27	04	00	05	00	00	37
	b. SMPN 2 Sampolawa	00	15	00	00	01	00	00	16
	c. SMPN 3 Sampolawa	00	02	00	00	03	00	00	05
	Jumlah	01	44	04	00	09	00	00	58 (6,13)
04	Lasalimu :								
	a. SMPN 1 Lasalimu	00	09	03	00	03	00	01	16
	b. SMPN 2 Lasalimu	01	10	00	00	00	00	00	11
	Jumlah	01	19	03	00	03	00	01	27(2,86)

No	Kecamatan	Guru Menurut Status Kepegawaian							Jumlah (%)
		Tetap				Tidak Tetap			
		Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Yaya san	Tidak Tetap	Bantu Pusat	Bantu Daerah	
05	Kapontori :								
	a. SMPN 1 Kapontori	01	17	04	00	06	00	00	28
	b. SMPN 2 Kapontori	00	19	03	00	03	00	00	25
	c. SMPN 3 Kapontori	01	10	00	00	01	00	00	12
	Jumlah	02	46	07	00	10	00	00	65(6,88)
06	Gu :								
	a. SMPN 1 Gu	02	21	05	00	03	03	00	34
	Jumlah	02	21	05	00	03	03	00	34(3,59)
07	Mawasangka :								
	a. SMPN 1 Mawasangka	01	30	06	00	09	00	04	50
	b. SMPN 2 Mawasangka	00	01	00	00	08	00	00	09
	c. SMPN 3 Mawasangka	00	00	00	00	16	00	00	16
	Jumlah	01	31	06	00	33	00	04	75(7,94)
08	Lakudo :								
	a. SMPN 1 Lakudo	00	16	04	00	01	00	00	21
	b. SMPN 2 Lakudo	00	09	06	00	04	00	00	19
	c. SMPN 3 Lakudo	00	10	00	00	05	00	00	15
	d. SMPN 4 Lakudo	00	14	00	00	02	03	00	19
	e. SMPN 5 Lakudo	00	09	00	00	02	00	00	11
	Jumlah	00	58	10	00	14	03	00	85 (8,99)
09	Lasalimu Selatan :								
	a. SMPN 1 Lasalimu Selatan	01	13	00	00	07	00	00	21
	b. SMPN 2 Lasalimu Selatan	00	00	00	00	05	00	01	06
	Jumlah	01	13	00	00	12	00	01	27(2,86)

No	Kecamatan	Guru Menurut Status Kepegawaian						Jumlah (%)	
		Tetap				Tidak Tetap			
		Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Yaya san	Tidak Tetap	Bantu Pusat		Bantu Daerah
10	Mawasangka Timur :								
	a. SMPN 1 Mawasangka Timur	01	12	00	00	05	00	00	18
	b. SMPN 2 Mawasangka Timur	00	00	00	00	00	00	00	00
	Jumlah	01	12	00	00	15	00	00	18 (1,90)
11	Siompu :								
	a. SMPN 1 Siompu	00	18	09	00	02	01	00	30
	Jumlah	00	18	09	00	02	01	00	30(3,17)
12	Kadatua :								
	a. SMPN 1 Kadatua	02	13	01	00	02	00	00	18
	b. SMPN 2 Kadatua	01	16	00	00	01	00	00	18
	Jumlah	03	29	01	00	03	00	00	36(3,80)
13	Talaga Raya :								
	a. SMPN 1 Talaga Raya	01	12	03	00	02	00	01	19
	Jumlah	01	12	03	00	02	00	01	19 (2,01)
14	Batuatas :								
	a. SMPN 1 Batuatas	00	12	03	00	02	00	01	19
	Jumlah	00	12	03	00	02	00	01	19(2,01)
15	Wolowa :								
	a. SMPN 1 Wolowa	00	00	17	00	08	00	01	26
	Jumlah	00	00	17	00	08	00	01	26(2,75)

No	Kecamatan	Guru Menurut Status Kepegawaian							Jumlah (%)
		Tetap				Tidak Tetap			
		Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Yaya san	Tidak Tetap	Bantu Pusat	Bantu Daerah	
16	Sangia Wambulu :								
	a. SMPN 1 S. Wambulu	00	11	00	00	00	00	03	14
	b. SMPN 2 S. Wambulu		12	02	00	01	00	00	15
	Jumlah	00	23	02	00	01	00	03	29(3,07)
17	Siompu Barat :								
	a. SMPN 1 Siompu B	00	12	04	00	04	00	00	20
	Jumlah	00	12	04	00	04	00	00	20 (2,12)
18	Mawangka Tengah :								
	a. SMPN 1 Mawa. Tengah	00	09	02	00	02	00	04	17
	Jumlah	00	09	02	00	02	00	04	17(1,79)
19	Wabula :								
	a. SMPN 1 Wabula	01	25	05	00	02	01	00	34
	Jumlah	01	25	05	00	02	01	00	34(3,59)
20	Siontapina :								
	a. SMPN 1 Siontapina	00	22	01	00	06	00	00	29
	Jumlah	00	22	01	00	06	00	00	29(3,07)
21	Lapandewa :								
	a. SMPN 1 Lapandewa	00	12	00	00	02	00	00	14
	b. SMPN 2 Lapandewa	00	06	00	00	03	00	00	09
	c. SMPN 3 Lapandewa	00	00	00	00	00	00	00	00
	Jumlah	00	18	00	00	05	00	00	23(2,43)
	TOTAL	16	619	109	00	170	15	16	945
	%	16,93	65,50	11,53	0	17,98	15,87	16,93	

Sumber Data : Subdin Perencanaan Dinas Diknas Kab. Buton

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah guru SMP se Kabupaten Buton adalah sebanyak 945 orang yang tersebar pada 21 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut : Terbanyak adalah pertama terdapat pada Wilayah Kecamatan Pasarwajo 188 orang (19,89%), kemudian menyusul terbanyak kedua Kecamatan Batauga sebanyak 86 orang (9,10 %) dan terbanyak ketiga adalah Kecamatan Lakudo 85 orang (8,99%). Kecamatan pasarwajo menjadi peringkat pertama karena kecamatan ini merupakan Ibu Kota Kabupaten Buton sedangkan Kecamatan Batauga dan kecamatan Lakudo menjadi peringkat kedua dan ketiga karena Kecamatan tersebut merupakan salah satu Kecamatan yang paling terdekat dengan Kota Bau-Bau Kemudian yang paling sedikit jumlahnya adalah pertama Kecamatan Mawasangka Tengah 17 orang (1,79 %), kedua Kecamatan Masangka Timur (1,90 %) dan ketiga Kecamatan Talaga Raya dan kecamatan Batu Atas masing-masing 19 orang (2,01%). Kecamatan Mawasangka Timur dan Tengah mempunyai guru yang relatif sedikit karena kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan induk yaitu Kecamatan Mawasangka sehingga tenaga pengajarnya relatif sedikit, sedangkan Kecamatan Talaga Raya dan Kecamatan Batu Atas terjadi kekurangan guru karena kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling jauh dan terpencil dari Kabupaten Buton sehingga banyak guru yang enggan bertugas di daerah tersebut karena keras ombak dan transportasi kurang lancar. Hal ini menyebabkan pula pendistribusian guru disetiap kecamatan belum merata.

Tabel 4.7 Keadaan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton Perkecamatan

No	Kecamatan	Guru Menurut Status Kepegawaian							Jumlah (%)
		Tetap				Tidak Tetap			
		Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Yaya san	Tidak Tetap	Bantu Pusat	Bantu Daerah	
01	Pasarwarjo :								
	a. SMAN 1 Pasarwarjo	-	45	21	-	08	-	-	74
	b. SMAN 2 Pasarwarjo	-	17	02	-	06	-	-	25
	Jumlah		62	23		14	-	-	79(22,14)
02	Batauga :								
	a. SMAN 1 Batauga	-	39	07	-	08	-	-	54
	Jumlah	-	39	07	-	08	-	-	54(12,08)
03	Sampolawa :								
	a. SMAN 1 Sampolawa	-	27	06	-	05	-	-	38
	Jumlah		27	06	-	05	-	-	38(8,50)
04	Kapontori :								
	a. SMAN 1 Kapontori	-	20	04	-	03	-	-	27
	b. SMAN 2 Kapontori	-	19	05	-	05	-	-	29
	Jumlah	-	39	09	-	08	-	-	56 (12,53)
05	Mawasangka :								
	a. SMAN 1 Mawasangka	-	43	18	-	7	-	-	68
	Jumlah	-	43	18	-	7	-	-	68 (15,21)
06	Lakudo								
	a. SMAN 1 Lakudo	-	16	03	-	5	-	-	24
	Jumlah		16	03	-	5			24(5,36)

No	Kecamatan	Guru Menurut Status Kepegawaian							Jumlah (%)
		Tetap				Tidak Tetap			
		Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Yaya san	Tidak Tetap	Bantu Pusat	Bantu Daerah	
07	Gu								
	a. SMAN 1 Gu	-	45	16	-	6	-		67
	Jumlah	-	45	16	-	6	-		67(14,98)
08	Talaga Raya								
	a. SMAN 1 Talaga Raya	-	2	1	-	12	-		15
	Jumlah	-	2	1	-	12	-		15 (3,35)
09	Wabula :								
	a. SMAN 1 Wabula	-	14	5	-	7	-	-	26
	Jumlah	-	14	5	-	7	-	-	26 (5,82)
	TOTAL	0	287	88	0	72	0	0	447
	%	0,00	64,20	19,68	0,00	16,10	0,00	0,00	

Sumber : Subbagian Kepegawaian Diknas Kabupaten Buton

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah guru SMA se Kabupaten Buton adalah sebanyak 447 orang yang tersebar pada 9 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut : Terbanyak adalah pertama terdapat pada Wilayah Kecamatan Pasarwajo 99 orang (22,14%), kemudian menyusul terbanyak kedua Kecamatan Mawasangka sebanyak 68 orang (15,21 %) dan terbanyak ketiga adalah Kecamatan Gu, 67 orang (14,98%). Kecamatan pasarwajo menjadi peringkat pertama karena kecamatan ini merupakan Ibu Kota Kabupaten Buton sedangkan Kecamatan Mawasangka dan Kecamatan Gu menjadi peringkat kedua dan ketiga karena pendirian atau pembangunan SMA telah lama dibangun, sedangkan dikecamatan lain

belum lama memiliki SMA. Kemudian yang paling sedikit jumlah gurunya adalah pertama Kecamatan Talaga Raya, 15 orang (3,35 %), kedua Kecamatan Lakudo, 24 orang (5,36 %) dan ketiga Kecamatan Wabula, 26 orang (5,82 %). Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Lakudo dan Kecamatan Wabula mempunyai guru yang relatif sedikit karena pembaungan SMA di tiga kecamatan ini belum terlalu lama yaitu baru sekitar 5 tahun selain itu juga disebabkan jangkauannya terlalu jauh dengan Kabupaten Buton khususnya SMA Negeri 1 Talaga Raya. Hal ini menyebabkan pula pendistribusian guru disetiap kecamatan belum merata.

B. Efektifitas Implementasi Wajib Belajar Sembilan Tahun

Pemerintah mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun disaat hari pendidikan nasional, tanggal 2 Mei 1994 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1994 yang ditujukan kepada Menkokesra, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebagai gerakan nasional terhitung tahun pelajaran 1994/1995. Melalui intruksi tersebut maka diharapkan setiap propinsi maupun kota/kabupaten dapat melaksanakan dengan penuh rasa tanggung agar dapat berjalan dengan baik dan efektif, karena melihat kondisi pendidikan anak-anak bangsa masih ada yang belum mengenyam pendidikan atau putus sekolah khususnya ditingkat SD dan SMP karena keterbatasan intra struktur, letak geogefafis antara daerah satu dengan yang lain cukup berjauhan serta keterbatasan ekonomi orang tua siswa yang relatif rendah sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

Oleh sebab itu pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin agar angka partisipasi kasar (APK) usia sekolah wajib belajar sembilan tahun disetiap tahun dapat ditingkatkan, hal ini berdasarkan laporan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2008 disaat upacara Hari Pendidikan Nasional bahwa angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP seluruh Indonesia telah mencapai 92,52 % sehingga yang perlu dituntaskan tinggal 2,48 %, sedangkan untuk angka partisipasi kasar (APK) SD telah mencapai 95 % namun demikian belum semua daerah telah mencapai angka partisipasi dimaksud khususnya pada wilayah Kabupaten Buton.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis dapat memberikan gambaran kondisi persekolah dan angka partisipasi kasar (APK) setiap jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Buton yaitu sebagai berikut,

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.8 Keadaan Angka Partisipasi Kasar (APK) Dan Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton

No	Kecamatan	Jumlah SD,MI,SDLB	Jumlah Siswa	APK	APM
01	Pasarwarjo	31	6290	108,22	92,18
02	Batauga	13	2256	106,14	92,38
03	Sampolawa	16	3729	106,39	92,12
04	Lasalimu	17	1989	101,23	89,14
05	Kapontori	21	4043	103,14	87,23
06	Gu	15	3043	104,23	90,25
07	Mawasangka	20	3861	106,29	91,85
08	Lakudo	19	3926	103,32	92,67
09	Lasalimu Selatan	17	2240	104,09	87,12
10	Mawasangka Timur	09	995	102,28	88,76
11	Siompu	08	1816	102,15	90,24
12	Kadatua	08	1341	103,23	69,80
13	Talaga Raya	09	2044	106,79	78,56
14	Batuatas	05	2274	104,70	99,31
15	Wolowa	07	1104	108,97	95,56
16	Sangia Wambulu	07	988	109,97	91,89
17	Siompu Barat	06	1580	108,21	87,56
18	Mawangka Tengah	07	1344	107,04	86,93

No	Kecamatan	Jumlah SD,MI,SDLB	Jumlah Siswa	APK	APM
19	Wabula	06	1228	109,16	86,80
20	Siontapina	13	2661	117,95	95,48
21	Lapandewa	07	1609	119,19	85,85
	Jumlah	261	50.357	117,57	84,50

Sumber : Subdin perencanaan Dinas Diknas Kabupaten Buton tahun 2007

Berdasarkan data di atas maka dapat dijelaskan bahwa unit sekolah SD/MI/SDLB di Kabupaten Buton berjumlah 261 unit dengan jumlah siswa 50.357 orang, sedangkan rata-rata angka partisipasi kasar (APK) untuk tingkat SD/MI/SDLB Kabupaten Buton sebesar 117,57% sedangkan angka partisipasi murni sebesar 84,50%. Ini berarti wajib belajar untuk SD/MI/SDLB telah menunjukkan hasil yang maksimal dalam memperoleh pendidikan. Dan jumlah siswa yang terbanyak adalah terdapat di wilayah Kecamatan Pasarwajo sebanyak 6290 orang sedangkan jumlah siswa yang kurang adalah terdapat pada Kecamatan Sangia Wambulu dengan jumlah 988 orang.

Kemudian untuk SD yang tertinggi APK adalah Kecamatan Lapandewa Wasarwajo dengan persentase APK (119,19%) dan APM tertinggi adalah Kecamatan Batuatas (99,31%), sedangkan yang terendah APK-nya adalah Kecamatan Lasalimu (101,23%) dan APM terendah adalah Kecamatan Talaga Raya (78,56%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa APK dan APM di setiap kecamatan tidak merata tergantung jumlah penduduk, kelompok usia sekolah dan kesadaran peserta didik serta orang tua siswa di setiap kecamatan.

Tabel 4.9 Keadaan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton

No	Kecamatan	Jumlah SMP/MTs	Jumlah Siswa	APK	APM
01	Pasarwarjo	4	2.113	78,34	58,09
02	Batauga	2	644	65,13	51,22
03	Sampolawa	2	791	69,33	36,37
04	Lasalimu	2	390	83,30	63,45
05	Kapontori	3	511	53,03	32,23
06	Gu	1	515	51,62	40,47
07	Mawasangka	1	635	72,00	50,11
08	Lakudo	5	494	86,87	56,00
09	Lasalimu Selatan	1	449	81,43	48,18
10	Mawasangka Timur	1	171	57,10	37,28
11	Siompu	2	386	77,72	72,83
12	Kadatua	2	494	81,82	64,24
13	Talaga Raya	1	512	76,77	62,07
14	Batuatas	1	413	57,68	40,89
15	Wolowa	1	256	90,15	67,08
16	Sangia Wambulu	2	382	56,17	40,20
17	Siompu Barat	1	502	58,55	40,82
18	Mawangka Tengah	1	361	56,89	45,57

NO	KECAMATAN	JUMLAH SMP/MTs	JUMLAH SISWA	APK	APM
19	Wabula	1	207	70,30	51,16
20	Siontapina	1	406	60,00	35,57
21	Lapandewa	2	535	57,11	42,53
	Jumlah	37	11.167	68,63	49,35

Sumber : Subdin perencanaan Dinas Diknas Kabupaten Buton

Berdasarkan data di atas maka dapat dijelaskan bahwa unit sekolah SMP/MTs di Kabuapten Buton berjumlah 37 unit dengan total siswa 11.167 orang, sedangangkan rata-rata partisipasi kasar (APK) untuk tingkat SMP/MTs Kabupaten Buton sebesar 68,63 % sedangkan angka partisipasi murni sebesar 49,35 %. Ini berarti wajib belajar untuk SMP/MTs belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam memperoleh pendidikan. Dan jumlah siswa yang terbanyak adalah terdapat di wilayah Kecamatan Pasarwajo sebanyak 2.113 orang sedangkan jumlah siswa yang kurang adalah terdapat pada Kecamatan Mawasangka Timur dengan jumlah 171 orang..

Kemudian untuk SMP/MTs yang tertinggi APK adalah Kecamatan Wolowa dengan persentase APK (90,15%) dan APM tertinggi adalah Kecamatan Siompu (72,83 %), sedangkan yang terendah adalah APK-nya adalah Kecamatan Gu (51,62 %) dan APM terendah adalah Kecamatan Kapontori (32,23 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa APK dan APM disetiap kecamatan tidak merata tergantung jumlah penduduk, kelompok usia sekolah dan kesadaran peserta didik serta orang tua siswa disetiap kecamatan.

Tabel 4.10 Keadaan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton

No	Kecamatan	Jumlah SMA/MA	Jumlah Siswa	APK	APM
01	Pasarwarjo	4	1.859	117,21	81,40
02	Batauga	1	465	106,90	50,11
03	Sampolawa	1	222	37,12	52,51
04	Lasalimu	1	152	33,33	27,41
05	Kapontori	3	341	44,81	26,28
06	Gu	1	521	68,10	50,85
07	Mawasangka	1	599	91,59	54,13
08	Lakudo	2	490	93,16	60,84
09	Lasalimu Selatan	2	289	66,44	24,83
10	Mawasangka Timur	1	89	36,33	25,31
11	Siompu	1	76	22,03	20,29
12	Kadatua	1	32	9,85	4,31
13	Talaga Raya	1	130	23,81	11,90
14	Batuatas	1	61	17,23	5,08
15	Wolowa	1	124	38,15	31,38
16	Sangia Wambulu	1	216	63,16	52,63
17	Siompu Barat	1	292	62,39	43,38
18	Mawangka Tengah	1	77	23,99	17,45

No	Kecamatan	Jumlah SMA/MA	Jumlah Siswa	APK	APM
19	Wabula	1	155	51,16	36,30
20	Siontapina	1	46	13,33	13,33
21	Lapandewa	1	190	34,12	34,12
	Jumlah	28	6,426	50,70	34,47

Sumber : Subdin perencanaan Dinas Diknas Kabupaten Buton tahun 2007

Berdasarkan data di atas maka dapat dijelaskan bahwa unit sekolah SMA/MA di Kabupaten Buton berjumlah 28 unit dengan total siswa 6.426 orang, sedangkan rata-rata partisipasi kasar (APK) untuk tingkat SMA/MA Kabupaten Buton sebesar 50,70 % sedangkan angka partisipasi murni sebesar 34,47 %. Ini berarti wajib belajar untuk SMA/MA belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam memperoleh pendidikan. Dan jumlah siswa yang terbanyak adalah terdapat di wilayah Kecamatan Pasarwajo sebanyak 1859 orang sedangkan jumlah siswa yang kurang adalah terdapat pada Kecamatan Kadatua dengan jumlah 32 orang..

Kemudian untuk SMA/MA yang tertinggi APK adalah Kecamatan Pasarwajo dengan persentase APK (117,21%) dan APM tertinggi adalah Kecamatan Siompu (81,40 %), sedangkan yang terendah adalah APK-nya adalah Kecamatan Kadatua (9,85 %) dan APM terendah adalah Kecamatan Kadatua (4,31 %). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa APK dan APM di setiap kecamatan tidak merata tergantung jumlah penduduk, kelompok usia sekolah dan kesadaran peserta didik serta orang tua siswa di setiap kecamatan.

Berdasarkan data persekolahan dan angka partisipasi kasar setiap jenjang pendidikan di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Achmad Slamet (2006 : 75-76) bahwa efektif tidaknya implementasi kebijakan wajib belajar ditentukan oleh beberapa komponen yaitu *input, proses, output* dan *out come* . Slamet menjelaskan bahwa input pendidikan meliputi kondisi : (a) fisiologis, seperti : visi, misi dan tujuan pendidikan, artinya intitusi pendidikan idealnya dapat merumuskan visi dan misi serta tujuan pendidikan yang jelas sehingga peserta didik dapat termotivasi untuk dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. (b) manusia : seperti peserta didik, guru dan administasi lainnya, artinya pemamahan dan kesadaran peserta didik tentang arti dan pentingnya pendidikan bagi masa depan sangat penting karena keberhasilan dan kesuksesan seorang tergantung sejauhmana tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang, begitu pula keberadaan seorang guru dan pengelolaan administrasi pendidikan disetiap sekolah sangat memegang peranan penting karena itu guru harus memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mampu mentrasfer ilmunya kepada peserta didik karena tidak ada artinya sarana belajar yang ada kalau tidak dilengkapi dengan tenaga pengajar yang medai . (c) fisik, seperti : gedung sekolah, peralatan material yang digunakan untuk proses belajar mengajar, artinya perlu adanya keserasian antara peserta didik, guru dan pengelolaan administasi dengan sarana prasana yang ada karena seorang guru dan peserta didik dalam pelaksanaan proses pembelajaran tidak dapat berjalan efektif apaliba tidak dalam keadaan nyaman , oleh sebab itu sarana fisik juga sangat berpengaruh terhadap kelangsungan *proses* belajar mengajar karena dengan berlangsungnya proses belajar

mengajar yang efektif dapat menghasilkan *output* yang maksimal pula sehingga akan diperoleh *outcome* atau manfaat sesuai dengan yang diharapkan seperti peningkatan pendapatan, perilaku produktif, perilaku sehat keharmonisan antara sesama keluarga maupun sebagai warga negara.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis melalui angket yang telah disebarakan kepada 50 responden maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.11 Data Hasil Responden Penelitian

No	Skor	Jumlah	%	Nilai	Keterangan
1	81 – 100	42	84 %	A	Sangat Efektif
2	61 - 80	8	16 %	B	Efektif
3	41 - 60	0	0 %	C	Cukup Efektif
4	21 - 40	0	0%	D	Kurang Efektif
5	0 - 20	0	0%	E	Tidak Efektif
	Jumlah	50	100 %		

Sumber : Data Hasil Penelitian

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Buton telah berjalan efektif yaitu dari 50 responden, 42 orang (84%) mengatakan sangat efektif dan 8 orang (16 %) mengatakan efektif dan yang mengatakan ragu-ragu, kurang efektif dan tidak efektif , tidak ada (0%).Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh masyarakat, orang tua siswa dan LSM berdasarkan hasil wawancara pelulis dari tiga zona lokasi penelitian, yaitu Daratan Buton, Daratan Muna dan Wilayah Buton

Kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan dasar sembilan tahun dipandang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton, sebagaimana terlihat pada hasil ujian nasional setiap tahun mengalami peningkatan pada sekolah yang menjadi sasaran lokasi penelitian.

Untuk lebih jelasnya penulis dapat menjelaskan setiap instrumen yang diberikan kepada respondent yaitu sebagai berikut,

Tabel 4.12 Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dapat Meningkatkan Kualitas Pendidikan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	00	00
4	Setuju	03	06
5	Sangat setuju	47	94
	<i>Jumlah</i>	50	100

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 47 orang (94%) mengatakan sangat setuju bahwa pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dapat meningkatkan kualitas pendidikan, 3 orang (06%) mengatakan setuju dan yang mengatakan ragu-ragu, kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0%). Ini berarti bahwa pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton

Tabel 4.13 Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dapat Meminimalkan dan Mengatasi Siswa yang Putus Sekolah

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	00	00
4	Setuju	07	14
5	Sangat setuju	43	86
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 43 orang (86%) mengatakan sangat setuju bahwa pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dapat meminimalkan dan mengatasi siswa yang putus sekolah, 7 orang (14%) mengatakan setuju dan yang mengatakan ragu-ragu, kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0%). Ini berarti bahwa pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dapat mengurangi siswa yang putus sekolah karena banyak kebutuhan siswa telah disiapkan oleh sekolah sehingga mengurangi beban orang tua.

Tabel 4.14 Program Pemerintah tentang Pendidikan dasar 9 tahun dapat Membantu Orang Tua Siswa yang Kurang Mampu

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekufensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	00	00
4	Setuju	05	10
5	Sangat setuju	45	90
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 45 orang (90%) mengatakan sangat setuju bahwa program pemerintah tentang pendidikan dasar 9 tahun dapat membantu orang tua siswa yang kurang mampu, 5 orang (10%) mengatakan setuju dan yang mengatakan ragu-ragu, kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0%). Ini berarti bahwa program wajib belajar 9 tahun dapat membantu meringankan beban orang tua siswa dalam menanggulangi biaya sekolah.

Tabel 4.15 Program Pemerintah tentang Pendidikan Dasar 9 Tahun Dapat Meningkatkan Beban Orang Tua Siswa Sehingga tidak ada Alasan bagi Orang Tua untuk tidak Menyekolahkan Anaknya

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekufensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	00	00
4	Setuju	04	08
5	Sangat setuju	46	92
	<i>Jumlah</i>	50	100

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 46 orang (92%) mengatakan sangat setuju bahwa program pemerintah tentang pendidikan dasar 9 tahun dapat meringankan beban orang tua siswa sehingga tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan putra-putrinya, 4 orang (8%) mengatakan setuju dan yang mengatakan ragu-ragu, kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0%). Ini berarti bahwa dengan adanya program wajib belajar 9 tahun diharapkan kepada orang tua dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyekolahkan putra-putrinya sehingga tidak perlu lagi melibatkan anak pada jam sekolah untuk membantu orang tua dalam meningkatkan ekonomi keluarga kecuali diluar jam sekolah.

Tabel 4.16 Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat Mendorong Angka Partisipasi Kasar Usia Sekolah 07 – 15 Tahun

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	00	00
4	Setuju	07	14
5	Sangat setuju	43	86
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 43 orang (86%) mengatakan sangat setuju bahwa program pemerintah tentang pendidikan dasar 9 tahun dapat mendorong angka partisipasi kasar usia sekolah 07 – 15 tahun meningkat, 7 orang (14 %) mengatakan setuju dan yang mengatakan ragu-ragu, kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0%). Ini menunjukkan bahwa dengan adanya program wajib belajar 9 tahun dapat mengurangi siswa yang putus sekolah atau angka partisipasi kasar usia sekolah 07 – 15 tahun setiap tahun semakin meningkat, sebagaimana terlihat pada tabel 4.8 dan tabel 4.9 tentang keadaan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni SD dan SLTP.

Tabel 4.17 Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Bukan Berarti Pihak Sekolah Setiap Akhir Tahun Ajaran Siswa harus Naik Kelas

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	09	18
4	Setuju	23	46
5	Sangat setuju	18	36
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 18 orang (36 %) mengatakan sangat setuju bahwa pelaksanaan wajib belajar 9 tahun bukan berarti pihak sekolah setiap akhir tahun ajaran harus lulus atau naik kelas, 23 orang (46 %) mengatakan setuju dan yang mengatakan ragu-ragu 9 orang (18 %) sedangkan yang mengatakan kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0%). Ini berarti bahwa dengan adanya program wajib belajar 9 tahun siswa dengan mudah naik kelas atau lulus tetapi kualitas siswa tetap diutamakan sebagaimana terlihat pada Lampiran : 4 tentang Data Hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006 sampai Tahun Pelajaran 2007/2008.

Tabel 4.18 Setiap Akhir Tahun Ajaran Siswa harus lulus Semua atau Naik Kelas karena Apabila Tidak Naik maka Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Belum Terlaksana dengan secara Efektif

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Sangat setuju	00	00
2	Setuju	00	00
3	Ragu-ragu	20	40
4	Kurang setuju	20	40
5	Tidak setuju	10	20
	<i>Jumlah</i>	50	100

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 10 orang (20 %) mengatakan tidak setuju bahwa setiap akhir tahun ajaran siswa harus lulus semua atau naik kelas apabila ada yang tidak naik maka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun belum terlaksana dengan secara efektif, 20 orang (40 %) mengatakan kurang setuju dan 20 orang (40 %) mengatakan ragu-ragu sedangkan yang mengatakan setuju dan tidak setuju tidak ada (0 %). Ini berarti bahwa program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun senantiasa tetap memperhatikan kualitas bukan kuantitas karena siswa tidak semudah itu untuk lulus atau naik kelas tetapi kompetensi siswa tetap diutamakan.

Tabel 4.19 Ruang Kegiatan Proses Belajar Mengajar Cukup Representatif Antara Jumlah Rombongan Belajar dengan Ruang Kelas

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekufensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	02	04
3	Ragu-ragu	06	12
4	Setuju	30	60
5	Sangat setuju	12	24
	<i>Jumlah</i>	50	100

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 12 orang (24 %) mengatakan sangat setuju bahwa ruang kelas kegiatan proses belajar mengajar cukup representatif antara jumlah rombongan belajar dengan ruang kelas, 30 orang (60 %) mengatakan setuju, 6 orang (12 %) mengatakan ragu-ragu dan 2 orang (4 %) mengatakan kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0 %). Ini menunjukkan bahwa dengan adanya program wajib belajar 9 tahun ruang kegiatan proses belajar mengajar di setiap sekolah telah cukup representatif antara jumlah rombongan belajar dengan ruang kelas, seperti SMP Negeri 1 Batauga, SMP Negeri 1 Lakudo SMP Negeri 2 Pasarwajo.

Tabel 4.20 Buku Pelajaran Penunjang Proses Belajar Cukup Memadai

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	11	22
4	Setuju	30	60
5	Sangat setuju	09	18
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 9 orang (18 %) mengatakan bahwa sangat setuju buku pelajaran kegiatan penunjang proses belajar mengajar cukup memadai, 30 orang (60 %) mengatakan setuju, 11 orang (22 %) mengatakan ragu-ragu dan yang mengatakan kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0 %). Ini berarti bahwa dengan adanya program wajib belajar 9 tahun buku pelajaran kegiatan penunjang proses belajar mengajar telah memadai pada setiap sekolah.

Tabel 4.21 Setiap Akhir Tahun Ajaran Siswa Putus Sekolah Berjumlah

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	21 ke atas	00	00
2	16 – 20 orang	00	00
3	11 – 15 orang	03	06
4	06 – 10 orang	17	34
5	00 – 05 orang	30	60
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 30 orang (60 %) mengatakan bahwa setiap akhir tahun ajaran siswa yang putus sekolah pada setiap sekolah sejumlah 0 – 5 orang, 17 orang (34 %) mengatakan 6 – 10 orang, 3 (6 %) mengatakan 11 – 15 orang dan 16 – 20 orang serta 21 orang keatas tidak ada (0 %). Ini berarti bahwa dengan adanya program wajib belajar 9 tahun siswa putus sekolah disetiap sekolah relatif sedikit yaitu hanya sekitar 1 – 5 orang. Hal ini sejalan dengan Data Dinas Diknas Kabupaten Buton pada Bidang Perencanaan Tahun 2007.

Tabel 4.22 Penyebab Siswa Putus Sekolah

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekufensi (%)
1	Keterbatasan ekonomi keluarga	00	00
2	Pengaruh lingkungan	02	04
3	Ingin bekerja untuk mendapatkan uang	05	10
4	Kurangnya pemahaman tentang arti dan pentingnya pendidikan	22	44
5	Semua jawaban benar.	21	42
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 21 orang (42 %) mengatakan bahwa pekonomi keluarga, pengaruh lingkungan, ingin bekerja untuk mendapatkan uang, kurangnya kesadaran tentang arti dan pentingnya pendidikan, 22 orang (44 %) mengatakan kurangnya pemahaman tentang arti dan pentingnya pendidikan, 5 orang (10 %) mengatakan karena ingin bekerja untuk mendapatkan uang dan 2 orang (4 %) mengatakan pengaruh lingkungan dan keterbatasan ekonomi keluarga tidak ada (0 %). Ini menunjukkan bahwa faktor penyebab siswa putus sekolah yang sangat dominan adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap arti dan pentingnya pendidikan bagi masa depan .

Tabel 4.23 Pelaksanaan Wajib belajar 9 Tahun Telah Berjalan Efektif

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekufensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	00	00
4	Setuju	21	42
5	Sangat setuju	29	58
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 29 orang (58 %) mengatakan sangat setuju bahwa pelaksanaan wajib belajar 9 tahun telah berjalan efektif, 21 orang (42 %) mengatakan setuju sedangkan ragu-ragu , kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0 %). Ini berarti bahwa pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di setiap sekolah di Kabupaten Buton telah berjalan efektif.

Tabel 4.24 Program Pemerintah tentang Pelaksanaan Pendidikan Non Formal khususnya Paket A, B dan C Sebaiknya Dihapus Sehingga Siswa Lebih Serius untuk Belajar pada Pendidikan Formal

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	06	12
2	Kurang setuju	08	16
3	Ragu-ragu	14	28
4	Setuju	13	26
5	Sangat setuju	09	18
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 9 orang (18 %) mengatakan sangat setuju bahwa program pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan non formal khususnya paket A, B dan C sebaiknya dihapus saja sehingga siswa lebih serius untuk belajar pada pendidikan formal, 13 orang (26 %) mengatakan setuju, 14 orang (28 %) mengatakan ragu dan 8 orang (16 %) mengatakan kurang setuju serta 6 orang (12 %) mengatakan tidak setuju. Ini berarti bahwa pemahaman tentang arti dan kualitas pendidikan dalam rangka menciptakan anak-anak bangsa yang berkualitas, kompotitif dan siap pakai menjadi salah satu kebutuhan utama dan sangat penting. Namun demikian daerah atau kecamatan yang letak geografinya sulit terganggu dengan sarana transportasi dan siswa yang orang tuanya kurang mampu dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan program paket A,B dan C atau SMP Terbuka.

Tabel 4.25 Program Pemerintah tentang Pelaksanaan Pendidikan Formal Khususnya Paket A, B, dan C Dapat Menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	02	04
4	Setuju	26	52
5	Sangat setuju	22	44
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 22 orang (44 %) mengatakan sangat setuju bahwa program pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan non formal khususnya paket A, B dan C dapat menuntaskan program wajib belajar 9 tahun, 26 (52 %) mengatakan setuju dan 2 orang (4 %) mengatakan ragu-ragu sedangkan yang mengatakan kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0 %). Ini berarti bahwa program pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan menggunakan sistem paket A, B dan C cukup efektif karena tidak semua siswa dapat menuntut pendidikan secara formal dipersekolah seperti pada umumnya karena tuntutan kebutuhan antara siswa dan kondisi wilayah suatu daerah tertentu berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Tabel 4.26 Program Pemerintah tentang Pelaksanaan Pendidikan Non Formal Khususnya Paket A, B dan C Tetap Dilaksanakan Namun Perlu Penyempurnaan karena Dapat menurunkan Motivasi Belajar Siswa di Pendidikan Formal.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	00	00
4	Setuju	20	40
5	Sangat setuju	30	60
	<i>Jumlah</i>	50	100

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 30 orang (60%) mengatakan sangat setuju bahwa program pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan non formal khususnya paket A, B dan C tetap dilaksanakan namun perlu penyempurnaan karena program tersebut dapat menurunkan motivasi belajar siswa yang sekolah dipendidikan formal, 20 (40%) mengatakan setuju dan yang mengatakan ragu-ragu, kurang setuju serta tidak setuju tidak ada (0%). Ini berarti bahwa pemahaman terhadap kualitas pendidikan dan kompetensi siswa sangat penting sehingga diharapkan kedepan para siswa tamatan pendidikan non formal seperti paket A, B dan C benar-benar cukup berkualitas minimal sejajar dengan tamatan pendidikan formal pada umumnya sehingga mekanisme pelaksanaan pendidikan non formal tersebut perlu dikelola dan disempurnakan dengan baik.

Tabel 4.27 Pelaksanaan Program Paket A,B, dan C Harus Melalui Proses Tatap Muka dengan Tutor

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekufensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	07	14
4	Setuju	23	46
5	Sangat setuju	20	40
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 20 orang (40 %) mengatakan sangat setuju bahwa Pelaksanaan program paket A, B dan C harus melalui proses tatap muka dengan tutor, 23 orang (46 %) mengatakan setuju, 7 orang (14 %) mengatakan kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0 %). Ini berarti bahwa pelaksanaan program paket A, B dan C dalam rangka efektifnya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun perlu disempurnakan dengan proses pembelajar sistem tutoriar kepada kelompok sanggar belajar dimana berlangsungnya kegiatan pendidikan non formal dimaksud.

Tabel 4.28 Mayoritas Siswa Usia SD dan SMP telah Memperoleh Pendidikan Dasar 9 Tahun

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	00	00
4	Setuju	05	10
5	Sangat setuju	45	90
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 45 orang (90 %) mengatakan sangat setuju bahwa Mayoritas siswa usia SD dan SMP telah memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, 5 orang (10 %) mengatakan setuju sedangkan yang mengatakan ragu, kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0 %). Ini berarti bahwa dengan adanya program wajib belajar 9 tahun mayoritas siswa usia SD dan SMP telah memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Tabel 4.29 Program Pemerintah tentang Wajib Belajar 9 Tahun Khususnya Adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sangat Membantu dan Meringankan Beban Orang Tua Siswa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	00	00
4	Setuju	03	06
5	Sangat setuju	47	94
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 47 orang (94%) mengatakan sangat setuju bahwa Program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun khususnya adanya bantuan operasional sekolah (BOS) sangat membantu dan meringankan beban orang tua siswa, 3 orang (6%) mengatakan setuju, sedangkan yang mengatakan ragu-ragu, kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0%). Ini berarti bahwa program pemerintah tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah banyak dirasakan oleh peserta didik karena program tersebut sangat membantu dan meringankan beban orang tua siswa sebagaimana terlihat pada tabel 4.8 tentang keadaan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni SD serta tabel 4.9 tentang angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni SMP/MTS tahun 2007.

Tabel 4.30 Manfaat yang Diperoleh Masyarakat dengan Adanya Program Wajib Belajar 9 Tahun

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Dapat mengurangi drop out	06	12
2	Dapat meringankan beban orang tua	10	20
3	Anak dapat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan	05	10
4	Meningkatkan kualitas pendidikan	11	22
5	Semua benar.	18	36
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 18 orang (36 %) mengatakan bahwa manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya program wajib belajar 9 tahun adalah dapat meningkatkan kualitas pendidikan, anak dapat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, dapat meringankan beban orang tua serta dapat mengurangi drop out. Ini berarti bahwa program wajib belajar 9 tahun telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena dapat mengurangi siswa yang *drop out* serta dapat meringankan beban orang tua siswa sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat, sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 tentang keadaan jumlah unit SD dan siswa serta tabel 4.2 tentang keadaan jumlah unit SMP/MTs dan siswanya tahun 2007.

Tabel 4.31 Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Wajib Belajar 9 Tahun Adalah Salah Satu Program Pemerintah Dalam Upaya Mengantisipasi Tuntutan Global.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	01	02
3	Ragu-ragu	10	20
4	Setuju	21	42
5	Sangat setuju	18	36
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 18 orang (36 %) mengatakan sangat setuju bahwa Implementasi kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun adalah salah satu Program pemerintah dalam upaya mengantisipasi tuntutan global, 21 orang (42 %) mengatakan setuju, 10 orang (20 %) mengatakan ragu-ragu, 1 orang (2 %) mengatakan kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0 %). Ini berarti bahwa program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi tuntutan global karena masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah ia tidak mampu berkompetisi dengan yang lain sehingga ia akan tertinggal.

Tabel 4.32 Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun Dapat Mengatasi Kurangnya Angka Pengangguran pada Setiap Kecamatan.

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	00	00
4	Setuju	17	34
5	Sangat setuju	33	66
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 13 orang (66 %) mengatakan sangat setuju bahwa Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dapat mengatasi kurangnya angka pengangguran pada setiap desa dan kecamatan 17 orang (34 %) mengatakan setuju dan yang mengatakan ragu-ragu, kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0 %). Ini berarti bahwa program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun dapat mengatasi kurangnya angka pengangguran pada setiap desa atau kelurahan dan kecamatan, sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 tentang keadaan jumlah unit SD dan siswa serta tabel 4.2 tentang keadaan jumlah unit SMP/MTs dan siswanya tahun 2007 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 4.33 Pelaksanaan wajib Belajar 9 tahun Dapat Meningkatkan Kualitas Pendidikan Secara Signifikan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	08	16
4	Setuju	24	48
5	Sangat setuju	18	36
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 18 orang (36 %) mengatakan sangat setuju bahwa Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dapat meningkatkan kualitas pendidikan setiap tahun secara signifikan, 24 orang (48 %) mengatakan setuju, 8 orang (16 %) mengatakan ragu-ragu, sedangkan kurang setuju dan tidak setuju, tidak ada (0%). Ini berarti bahwa program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang sangat signifikan, sebagaimana terlihat pada lampiran : 4 tentang data hasil ujian nasional dari tahun pelajaran 2007/2008 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun pelajaran 2005/2006 serta 2006/2007.

Tabel 4. 34 Orang Tua Siswa Sangat Antusias untuk Menyekolahkan Anaknya pada Pendidikan Dasar 9 Tahun karena Dapat meringankan Beban Orang Tua

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	01	02
4	Setuju	21	42
5	Sangat setuju	28	56
	<i>Jumlah</i>	50	100

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 28 orang (56 %) mengatakan sangat setuju bahwa Orang tua siswa sangat antusias untuk menyekolahkan anaknya pada pendidikan dasar 9 tahun karena dapat meringankan beban orang tua, 21 orang (42 %) mengatakan setuju, 1 Orang (2 %) mengatakan ragu-ragu sedangkan yang mengatakan kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0 %). Ini berarti bahwa program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun dapat meringankan beban orang tua siswa sehingga orang tua sangat antusias untuk menyekolahkan putra-putrinya pada sekolah pendidikan formal

Tabel 4.35 Kekurangan Sarana Ruang Belajar Mengajar Dapat Diatasi dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	02	04
4	Setuju	22	44
5	Sangat setuju	26	52
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 26 orang (52 %) mengatakan sangat setuju bahwa Kekurangan sarana ruang belajar mengajar dapat diatasi karena adanya program wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah, 22 orang (44 %) mengatakan setuju, 2 orang (4 %) mengatakan ragu-ragu sedangkan yang mengatakan kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0 %). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh masyarakat, orang tua siswa dan LSM berdasarkan hasil wawancara pelulis dari tiga zona lokasi penelitian yaitu Daratan Buton, Daratan Muna dan Wilayah Buton Kepulauan. Ini berarti bahwa dengan adanya program wajib belajar 9 tahun kekurangan sarana ruang belajar mengajar dapat teratasi pada setiap sekolah yang ada di Kabupaten Buton.

Tabel 4.36 Dalam Mengantisipasi Tuntutan Global Pemerintah Seharusnya Sudah Menerapkan Pendidikan Dasar 9 Tahun

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Frekufensi (%)
1	Tidak setuju	00	00
2	Kurang setuju	00	00
3	Ragu-ragu	00	00
4	Setuju	00	00
5	Sangat setuju	50	100
	<i>Jumlah</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

Sumber : Data hasil lapangan

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 50 responden, 50 orang (100 %) mengatakan bahwa Dalam mengantisipasi tuntutan global sekarang pemerintah seharusnya sudah menerapkan pendidikan dasar 12 tahun, sedangkan yang mengatakan setuju, ragu-ragu, kurang setuju dan tidak setuju tidak ada (0 %).

Berdasarkan hasil analisis penelitian diatas penulis dapat menjelaskan bahwa efektifitas implementasi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten Buton telah berjalan dengan efektif . Implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton telah berjalan efektif, hal ini berdasarkan hasil analisis 50 Responden, 42 orang (84%) mengatakan sangat efektif dan 8 orang (16 %) mengatakan efektif dan yang mengatakan ragu-ragu, kurang efektif dan tidak efektif, tidak ada (0%).

Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah pembangunan sarana prasana maupun penunjang pendidikan lainnya serta berkurangnya siswa yang putus sekolah, sehingga pada akhirnya juga turut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada seperti meningkatnya persentase kelulusan ujian nasional khususnya SLTP disetiap tahun mengalami peningkatan yaitu tahun pelajaran 2006/2007 sebesar 73,68% dan tahun pelajaran 2007/2008 menjadi 80,27%.

Konsep diatas sejalan dengan yang dimukakan oleh Nana Syaodih Sukmadinata *et al.* (2006 : 8) bahwa mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti lulusan tidak dapat melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan studinya pada jenjang yang lebih tinggi, tidak dapat bekerja, tidak diterima di dunia kerja, diterima bekerja, tetapi tidak berprestasi, tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan tidak produktif. Lulusan yang tidak produktif akan membebani masyarakat, menambah biaya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta memungkinkan menjadi warga yang tersisih dari masyarakat.

Disisi lain, Supriadi (2004 : 96) mengatakan bahwa indikator mutu pendidikan adalah hasil ujian nasional yang dicapai oleh siswa pada setiap tahun ajaran. Dikaitkan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, Dedi Supriadi (2004 : 97) mengemukakan bahwa pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun bertujuan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia Indonesia melalui peningkatan rata-rata pendidikannya hingga minimal setara SLTP. Sejak dimulai pada tahun 1994, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah mencapai banyak kemajuan. Indikator-indikator kuantitatif yang dicatat menunjukkan bahwa

APK meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya ruang belajar, jumlah guru, dan fasilitas belajar lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanto et al. (2003 : 149) ditemukan bahwa indikator untuk melihat mutu pendidikan dapat dilihat dari kesiapan sekolah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah mengenai Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMPBS). Data yang ditemukan menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan di berbagai daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terlihat belum siap melaksanakan kebijakan mengenai Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMPBS). Hal ini terlihat dari masih belum transparannya Dinas Pendidikan dalam merumuskan berbagai kebijakan atau program dasar untuk kepentingan pelayanan pendidikan. Pada kasus program pengadaan buku teks wajib bagi sekolah, misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dinilai oleh pihak sekolah tidak transparan sehingga berbagai praktik KKN antara Dinas Pendidikan dengan pihak penerbit buku masih seringkali dijumpai.

Pendapat yang berbeda dari para ahli pendidikan di atas dikemukakan oleh Slamet (2006 : 87-88) yang mengemukakan bahwa sebaiknya keberhasilan pendidikan formal tidak hanya dilihat dari mutu lulusan berdasarkan prestasi belajar semata, yang lebih penting adalah setiap lulusan pendidikan formal seharusnya memenuhi standar kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, perluasan pendidikan formal hendaknya mempertimbangkan keuntungan ekonomi lulusan guna memperoleh penghasilan dari hasil kerjanya pada masa depan sepanjang hidupnya. Selain itu, keberhasilan pendidikan formal juga diukur dari kebermaknaan keuntungan non ekonomi untuk meningkatkan kapabilitas

individu lulusannya dalam mengembangkan perilaku produktif, perilaku sehat, perilaku dalam kehidupan keluarga, perilaku berpartisipasi sebagai warga negara dan perilaku berbudaya.

Sebagai sebuah sistem, peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari berbagai komponen pendidikan. Menurut Umaedi sebagaimana dikutip oleh Kadir (2004 : 79) mengemukakan bahwa hasanah pembangunan sektor pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan, tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. *Input* pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu, tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan (*school resources are necessary but not sufficient condition to improve student achievement*).

Sejalan dengan pendapat di atas, Kadir (2004 :79) mengemukakan bahwa di satu sisi peningkatan mutu pendidikan akan dapat dicapai apabila melibatkan banyak komponen diantaranya : sarana dan prasarana penunjang, siswa sebagai peserta didik dan guru sebagai fasilitator, motivator, dan mitra konsultasi bagi siswa. Ini semua dapat dicapai apabila didukung oleh berbagai pihak, terutama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah yang kondusif, dan pemerintah sebagai penentu kebijakan. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan dapat diukur dengan dua aspek, yaitu aspek akademik yang memuat nilai ujian nasional dan hasil seleksi masuk pada perguruan tinggi, karya ilmiah, dan prestasi lomba akademik dan aspek non akademik yang menyangkut prestasi olah raga, kesenian, kerajinan, kedisiplinan, dan kegiatan Ektrakurikuler.

Pendapat ini diperkuat pula dengan Kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton disaat wawancara penulis pada tanggal 10 Januari 2009 di ruang kerjanya, para Kasudin dan kepala satuan pendidikan serta berarapa tokoh masyarakat, orang tua siswa dan LSM dari tiga zona lokasi penelitian yaitu Daratan Buton, Daratan Muna dan Wilayah Buton Kepulauan , bahwa efektivitas implemetasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun telah berjalan efektif di Kabupaten Buton dan bahkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan .

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan dasar Wajib Belajar 9 Tahun terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton telah berjalan efektif, yaitu 42 orang responden (84%) mengatakan sangat efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pemerintah tentang Wajib Belajar 9 Tahun dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buton adalah :
 - a. Lingkungan sosial, ekonomi, politik dan budaya serta letak geogografis artinya lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif pada suatu daerah turut menentukan keberhasilan suatu kebijakan begitu pula letak geogografis yang tidak strategis serta keanekaragaman suatu budaya pada daerah tertentu.
 - b. Adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga kegiatan penunjang proses belajar mengajar seperti buku dan media pembelajaran telah tersedia di setiap sekolah.
 - c. Adanya bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga sebagian besar ruang kegiatan proses belajar mengajar telah banyak dibangun dan direhabilitasi.
 - d. Adanya animo orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya karena biaya pendidikan relatif murah dan terjangkau.

- e. Adanya pemahaman dan kesadaran para peserta didik tentang arti dan pentingnya pendidikan bagi masa depan.
- f. Adanya program pendidikan non formal yang disiapkan oleh pemerintah melalui sistem paket A, B, SMP terbuka dan paket C

B. Saran

Dari beberapa simpulan di atas penulis dapat mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penerapan suatu kebijakan perlu mempertimbangan tentang kondisi lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya dan letak geogografis suatu daerah sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tepat sasaran.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun perlu dilanjutkan, namun mekanisme dan pelaksanaannya perlu ditinjau kembali dan diawasi secara bersama-sama seluruh stakeholder pendidikan.
3. Program Wajib Belajar 9 Tahun bukan berarti pihak sekolah semudah itu menaikkan atau meluluskan siswanya tanpa memperhatikan proses dan kualitas , tetapi harus berdasarkan kriteria kelulusan maupun kenaikan sehingga betul-betul memiliki kompetensi yang layak dan berkualitas.
4. Program pendidikan nonformal paket A, B dan SMP terbuka maupun paket C betul – betul dapat terlaksana sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku yaitu melalui tutorial atau proses pembelajaran. Bagi siswa yang belum memiliki kompetensi untuk naik atau lulus maka tidak perlu dinaikan atau diluluskan

karena hal itu dapat menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan serta menurunnya motivasi belajar bagi siswa yang mengikuti pendidikan formal.

5. Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun idealnya dapat ditingkatkan menjadi pendidikan dasar wajib belajar 12 tahun karena tuntutan globalisasi dimana setiap Bupati/Wali Kota dapat mengalokasikan dana melalui APBD minimal bantuan beasiswa baik siswa yang tidak mampu maupun siswa yang berprestasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar kebijakan publik*, Bandung : CV. Alfabeta
- Arikunto, S.(1995). *Manajemen penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Azwar, S. (1998). *Metode penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Buchori, M. (1994). *Pendidikan dalam pembangunan*, Yogyakarta : Tiara Wacana,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- _____. (1990). *Master instrumen pendataan perintisan wajib belajar SLTP*. Jakarta : Depdikbud.
- _____. (1996). *Petunjuk pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun*. Jakarta : Depdiknas.
- _____. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta : Depdiknas.
- Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton. (2007). *Rangkuman Data SD,SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Buton 2007/2008* : Pasarwajo
- Djojonegoro, W. (1994). *Kebijakan operasional wajib belajar sembilan tahun*, Jakarta : Balai Pustaka
- Dunn, N. William. (1994). *Pengantar analisis kebijakan publik (Edisi Indonesia oleh Darwin, Muhadjir, dkk. 1998)*. Yogyakarta : Gajah Mada
- Dwiyanto, A. (1995) *Penilaian kinerja organisasi pelayanan publik (Makalah)*. Yogyakarta : Fisipol UGM.
- _____. (2003). *Reformasi data pemerintahan dan otonomi daerah*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan-PEG Usaid-Bank Dunia. Yogyakarta : Gajah Mada
- Effendi, S. (1999). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik Yogyakarta* : Fisipol UGM.
- Ekosusilo, M., dan Kasihadi, RB. (1993). *Dasar-dasar pendidikan*. Semarang : Satya Wacana.
- Gibsson, Ivancevich, Donnelly. (1977). *Organisasi perilaku, struktur, proses*.

Jakarta : Binapura Aksara.

- Indar, Djumberansyah. (1995). *Perencanaan pendidikan, Strategi dan Implementasinya*. Jakarta : Karya Abditama.
- Islamy, M. I. (2005). *Kebijakan publik*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Istianda, M. (2007). *Panduan belajar studi Mandiri*. Jakarta :Universitas Terbuka
- Kadir. (2004). *Pengembangan Mutu Pendidikan Dengan Berbasis Masyarakat Yang Sehat*. Kendari : Majalah Gema Pendidikan, Nomor 21, Tahun XI, Januari 2004.
- Mulyasa, E . (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H., dan Martini. (1997). *Kebijakan Pendidikan Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Prihatin, D., S. (1997). *Pengembangan sumberdaya manusia, suatu Kebijakan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Riberu, J. (1983). *Pendidikan kunci pembangunan bangsa*. Jakarta : Prisma.
- Sarbiran, (1988), *Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta*. Yogyakarta : UNY
- Sudarwand. (1997). *Pengantar studi penelitian kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sukmadinata, N.S., et al. (2006). *Pengendalian mutu pendidikan sekolah : Konsep, prinsip, dan instrumen*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Slamet, A. (2006). *Investasi pendidikan sebagai pengembangan sumberdaya manusia*. Yogyakarta : Jurnal JSP (Ilmu Sosial Ilmu Politik) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Vol. 10, No.1, Juli 2006.
- Supriadi, D. (2004). *Membangun bangsa melalui pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. (1998). *Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional*. Jakarta : PT. Tera Indonesia.
- Wahab, Abdullah, Solihin, (1997). *Analisis kebijaksanaan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Zamroni, (2001). *Pendidikan untuk demokrasi : Tantangan menuju civil society*. Yogyakarta : Bigraf Publishing.

Lampiran 1. Daftar Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton

NO	NAMA/NIP	TEMPAT TGL LAHIR	PANGKAT /GOL	TMT	JABATAN	ESOLON	TMT JAB. /PELANTIKAN	PEND. TERAKHIR	KET
01	Drs. H. LA ODE ANWAR, M.Si NIP. 131 475 192	Meo-Meo/Buton Tahun 1957	Pemb. Utama Muda, IV/c	01/04/06	Kepala Dinas Diknas Kab. Buton	II b	11/01/2008	S.2	
02	Drs. HALIDIN NIP. 131 287 825	Buton, 19-09-1953	Pembina Tk I, IV/b	01/10/06	Kasubdin Pend SMA/SMK	III.a	11/01/2008	S.1	
03	BUCHARI, M. S.Pd NIP. 130 685 430	Kaobula, 1954	Pembina, IV/a	01/10/02	Kepala Seksi SMK	IV a	30/01/2008	S.1	
04	ABD. SALAM, S.Pd NIP. 130 668 656	Bone-Bone, 01-09-1958	Pembina, IV/a	01/10/07	Sekretaris Dinas Diknas	III a	12-05-2008	S.1	
05	MUH. AMIR SYARIFUDIN, BA NIP. 131 414 458	Bau-Bau, 25-11-1953	Pembina, IV/a	01/10/06	Kabid Perencanaan	III a	11-01-2008	Sarjana Muda	
06	Drs. ISMAIL NIP. 132 133 791	Endrekang, Tahun 1965	Pembina, IV/a	01/10/06	Staf	-	-	S.1	
07	LD. KAHARUDDIN, S.Pd NIP. 131 406 319	Tampuna Bale, Tahun 1962	Pembina, IV/a	01/04/07	Kasi Pendidikan SMP	IV a	30-01-2008	S.1	
08	H. MASWAN S.S.Pd 130 701 316	Usuku, Tahun 1956	Penata Tk.I III/d	01/07/01	Kasi Pend. Luar Sekolah dan Keb.	IVa	30-01-2008	S.1	
09	Drs. BAHRUN DAMUNU NIP. 132 047 899	Bau-Bau, 29-07-1968	Penata Tk.I III/d	01/10/01	Kasi Pembinaan pemuda dan Olahraga	IV a	30-01-2008	S.1	
10	ALIRMAN, SH. NIP. 130 818 090	Buton, 06-03-1953	Penata Tk.I III/d	01/10/04	Kabid. Dikluseporabud	III a	30-01-2008	S.1	
11	Drs. HAMRIN NIP. 132 047 651	Wajo, Tahun 1962	Penata Tk.I III/d	01/10/05	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV a	30-01-2008	S.1	
12	Drs. L.M. MUSLIM. T NIP. 130 980 483	Buton, 01-08-1960	Penata Tk.I III/d	01/10/05	Kasi Pend. Pra Sekolah dan SD	IV a	30-01-2008		

NO	NAMA/NIP	TEMPAT TGL LAHIR	PANGKAT /GOL	TMT	JABATAN	ESOLON	TMT JAB. /PELANTIKAN	PEND. TERAKHIR	KET
13	Drs. LA SANIU NIP. 132 011 264	Mawasangka, 01 - 04 - 1959	Penata Tk.1 III/d	01/10/05	Kasi Penyusunan dan Pengumpulan Data	IV a	30-01-2008	S.1	
14	M. TAUFIK TOMBULI, S.Pd NIP. 132 133 798	Mawasangka, 01 - 10 - 1965	Penata Tk.1 III/d	01/04/06	Kasubdin Pra Sekolah dan Pend. Dasar	III/a	30-01-2008	S.1	
15	Drs. HARMIN NIP. 132 123 836	Buton, Tahun 1967	Penata Tk.1 III/d	01/10/05	-	-	-	S.1	
16	A R M A N NIP. 131 656 549	Buton, 17 - 07 - 1963	Penata Muda Tk.I, III/c	01/04/07	Kasi Monitoring, Evaluasi dan Program	IV a	30-01-2008	SLTA	
17	LD. SYAMSUDDIN, S.Pd NIP. 590 011 589	Dongkalla, Tahun 1972	Penata Muda Tk.I, III/c	01/04/07	Kasi SMA	IV a	30-01-2008	S.1	
18	DJAFAR, S.IP NIP. 130 980 559	Kahianga, Tahun 1962	Penata, III/c	01/04/06	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	S.1	
19	DJAKIR NIP. 130 785 691	Buton, 27 - 07 - 1953	Penata Muda Tk.I, III/c	01/10/99	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
20	LA ODE AKSA NIP. 380 015 562	Buton, 1959	Penata, III/c	01/04/06	Kasubag Perlengk. dan keuangan	IV a	30-01-2008	SLTA	
21	AMRIN DUMA NIP. 130 817 572	Buton, Tahun 1956	Penata Muda Tk.I, III/c	01/10/03	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
22	LD. INSAN ZAKIR NIP. 131 662 902	Banulo, 19 - 04 - 1964	Penata Muda Tk.I, III/c	01/10/07	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
23	LA MUNI NIP. 130 908 099	Buton, Tahun 1955	Penata Muda Tk.I, III/c	01/04/08	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
24	HUSNIAH, A NIP. 131 280 616	Bone-Bone Tahun 1953	Penata Muda Tk.I, III/c	01/10/08	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	

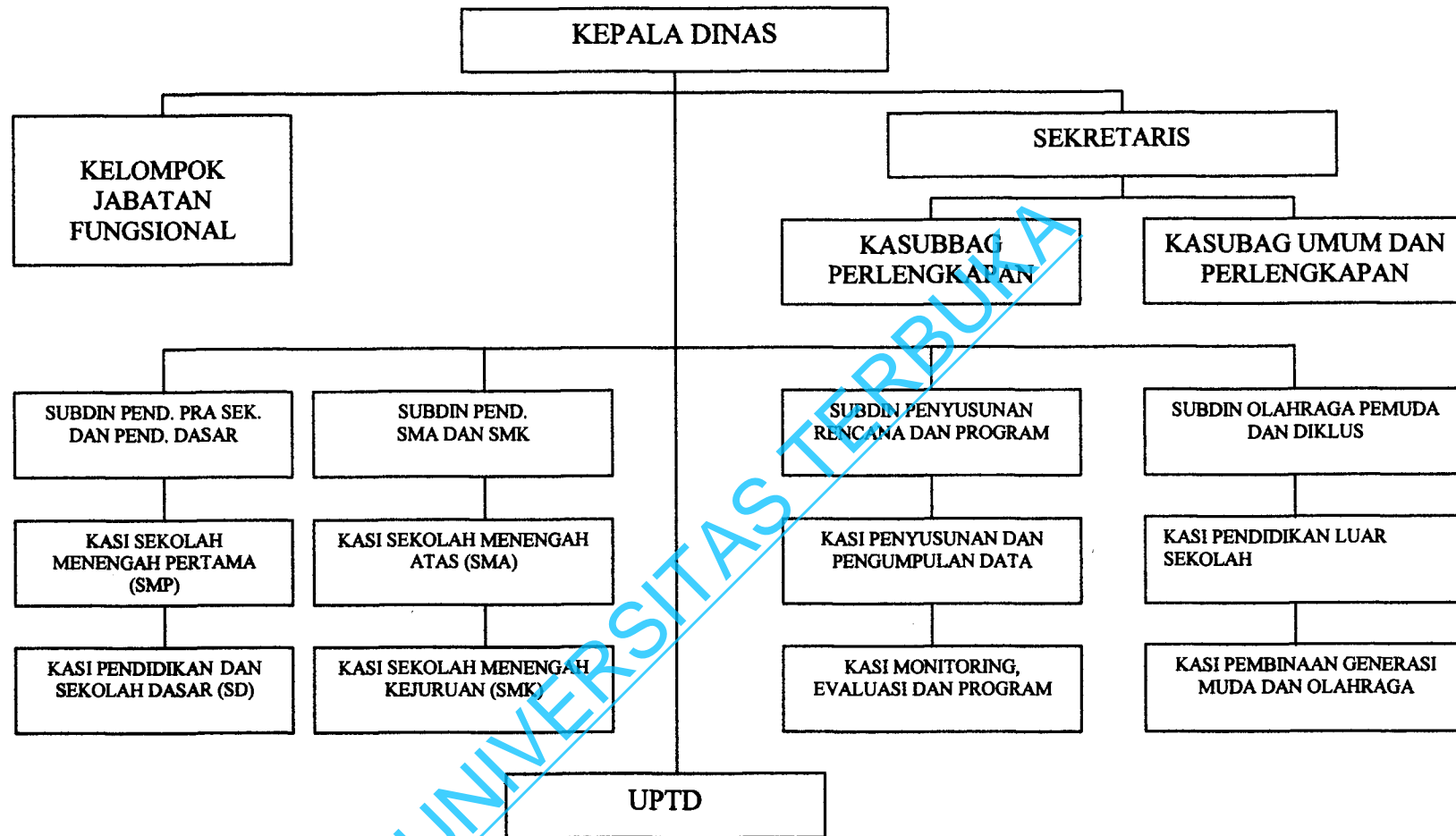
NO	NAMA/NIP	TEMPAT TGL LAHIR	PANGKAT /GOL	TMT	JABATAN	ESOLON	TMT JAB. /PELANTIKAN	PEN TERAKHIR	1244.pdf NET
25	ZAINUL NIP. 131 812 930	Buton, 31 -5 -1965	Penata Muda, III/a	01/10/05	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
26	KASIM NIP. 131 810 424	Baruta, 30 -12 - 1970	Penata Muda, III/a	01/04/05	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
27	MUCHTAR NIP. 131 108 824	Buton, 06 - 06 1956	Penata Muda, III/a	01/04/05	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
28	LA MUSA NIP. 131 462 977	Pasarwajo, 15 - 10 1954	Penata Muda, III/a	01/04/07	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
29	MALIHU NIP. 130 508 608	Buton, Tahun 1952	Penata Muda, III/a	01/04/07	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
30	MUSTARI NIP. 131 668 134	Maros, Tahun 1957	Penata Muda, III/a	01/04/08	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
31	HAKIMA NIP. 131 812 928	Bau-Bau, 28 -08 - 1959	Pengatur Tk.I, II/d	01/04/08	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
32	ABDUL MUTALIB NIP. 131 114 808	Batulo, 28-09-1960	Pengatur Tk I, II/d	01/04/05	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
33	MARTINA NIP. 132 046812	Buton, Tahun 1967	Pengatur Tk.I, II/d	01/04/05	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
34	LA DJANU NIP. 131 772 301	Ambon, 03-01-1968	Pengatur Tk.I, II/d	01/10/05	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	--	-	SLTA	
35	TAHIR EBA NIP. 132 089 316	Batulo, 10-02-1970	Pengatur Tk.I, II/d	01/04/06	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
36	GAFIRUDIN NIP. 131	Buton, 1967	Pengatur Tk.I, II/d	01/04/06	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
37	SITI RAMLA GANI ALI NIP. 131 622 458	Buton, 08-05-1962	Pengatur Tk.I, II/d	01/04/07	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
38	LA ODE TAFSIR NIP. 131 118 969	Me-Meo, 1952	Pengatur II/c	01/04/02	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	

NO	NAMA/NIP	TEMPAT TGL LAHIR	PANGKAT /GOL	TMT	JABATAN	ESOLON	TMT JAB /PELANTIKAN	PEND. TERAKHIR	KET
39	WD. HASIYNA NIP. 132 164 867	Bau-Bau, 21-07-1968	Pengatur II/c	01/10/06	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
40	WD. MUSIA NIP. 590 025 775	Bau-Bau, 09-12-1974	Pengatur II/c	01/01/07	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
41	LA MPIHU NIP. 131 217 337	Bau-Bau, 1970	Pengatur II/c	01/04/07	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
42	ARIFIN NIP. 131 747 301	Buton, 1966	Pengatur II/c	01/04/08	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
43	WA HALIJAH NIP. 130 914 167	Fak-Fak, 15-05-1962	Pengatur II/c	01/04/08	Staf Dinas Diknas Kab. Buton-	-	-	SLTA	
44	SUMARNI NIP. 132 279 108	Bataraguru, 21-04-1982	Peng. Muda Tk.I, II/b	01/04/05	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
45	SAMAOO NIP. 131 829 025	Batulo, 1954	Peng. Muda Tk.I, II/b	01/04/05	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
46	LA GANDE NIP. 131 829 025	Labahawa, 1970	Peng. Muda Tk.I, II/b	01/04/06	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
47	LA PENDUDU NIP. 131 778 576	Kombeli, 1965	Peng. Muda Tk.I, II/b	01/10/06	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
48	LA SIWADI NIP. 132 264 717	Kombeli, 1972	Peng. Muda Tk.I, II/b	01/10/06	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
49	LA INGAJI NIP. 131 747 257	Kombeli, 1962	Peng. Muda Tk.I, II/b	01/10/07	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
50	LA TUJI NIP. 132 287 441	Kombeli, 1971	Peng. Muda Tk.I, II/b	01/10/07	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
51	LA DIRU NIP. 132 287 429	Lapodi, 1972	Peng. Muda Tk.I, II/b	01/10/07	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
52	MUH. MITRA NIP. 132 288 512	Kendari, 19-06-1979	Peng. Muda Tk.I, II/b	01/10/08	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	

NO	NAMA/NIP	TEMPAT TGL LAHIR	PANGKAT /GOL	TMT	JABATAN	ESOLON	TMT JAB. /PELANTIKAN	PEN TERAKHIR	14/41244.pdf KET
53	I F O L NIP. 590 015 027	Pasarwajo, 1981	Peng. Muda Tk.I, II/b	01/02/05	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
54	SUJONO LA NIPA NIP. 131 828 929	Ambon, 05-05-1956	Pengatur Muda, II/a	01/10/05	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
55	WA ODE RASIAH GENDA NIP. 590 021 123	Banabungi, 29 - 12 - 1969	Pengatur Muda, II/a	01/04/06	Staf Dinas Diknas Kab. Buton	-	-	SLTA	
56	ADIMAN LA BATJO NIP. 131 769 881	Ambon, 23 - 10 - 1955	Pengatur Muda, II/a	01/10/06	Staf Dinas Diknas Kab. Buton		-	SLTA	

Sumber : Kasubag Kepegawaian Dinas Diknas Kabupaten Buton

UNIVERSITAS TERBUKA



Sumber : Kasubag Kepegawaian Dinas Diknas Kabupaten Buton

	Nomor Angket dan Skor																				Jumlah	Keterangan					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23	24	25
01	4	4	4	4	4	3	2	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	90	A	
02	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	91	A	
03	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	91	A	
04	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	93	A	
05	4	3	4	4	3	2	3	4	2	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	87	A	
06	4	4	3	4	4	2	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	88	A	
07	4	4	4	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	3	4	4	0	3	3	4	4	4	82	A	
08	4	4	4	4	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	1	2	3	4	2	3	4	80	B	
09	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	1	3	3	3	3	2	4	83	A	
10	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	2	4	4	4	3	4	1	4	3	4	3	3	4	82	A	
11	4	4	4	4	4	3	2	4	3	3	4	4	2	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	85	A	
12	4	4	4	4	4	3	3	2	2	3	4	3	1	4	4	3	3	4	1	4	4	2	3	3	4	80	B
13	3	4	4	4	4	3	3	2	2	2	4	3	1	3	4	2	4	4	3	4	4	3	3	4	81	A	
14	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3	4	3	2	4	3	2	4	4	4	3	4	3	3	3	4	86	A
15	4	4	3	4	4	4	3	3	2	4	4	3	2	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	87	A	
16	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	90	A	
17	4	3	4	4	4	4	2	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	89	A	
18	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	1	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	89	A	
19	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	0	4	3	3	4	4	0	3	4	4	3	4	85	A	
20	4	4	4	4	4	3	2	3	3	2	3	4	2	4	4	2	4	4	2	3	4	3	4	2	4	78	A
21	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	3	3	3	4	3	1	4	4	3	4	3	4	86	A
22	4	4	4	4	3	2	3	2	3	3	3	4	1	3	3	4	4	4	1	4	4	4	4	4	83	A	
23	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	1	4	3	4	4	4	86	A	
24	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	2	3	4	3	4	3	2	4	4	2	3	4	86	A	
25	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0	2	3	2	3	3	0	3	4	4	3	3	4	78	B
26	4	4	4	4	4	3	2	3	4	3	1	3	4	2	3	3	4	4	4	2	3	3	3	4	80	B	

Nomor Angket dan Skor																											
27	3	4	4	4	4	4	2	3	3	3	1	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	82	A	
28	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3	2	4	2	4	4	4	3	4	2	4	4	3	4	3	4	82	A
29	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	2	4	2	3	4	3	4	4	1	3	4	3	4	3	4	85	A
30	4	4	3	3	4	3	3	3	2	4	3	4	3	4	4	3	4	4	0	3	4	2	3	3	4	81	A
31	4	4	4	4	3	3	2	3	2	4	3	3	1	3	4	4	4	4	0	3	4	3	3	3	4	79	B
32	4	4	4	4	4	4	2	1	3	3	4	4	0	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	85	A
33	4	4	4	4	4	4	2	3	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	91	A
34	4	4	4	4	4	2	2	2	3	4	3	4	1	3	3	3	4	4	2	4	4	4	3	4	4	83	A
35	4	4	4	4	4	4	2	3	2	4	4	4	0	4	3	2	4	4	2	2	4	4	3	4	4	83	A
36	4	4	3	4	4	2	2	3	3	4	2	4	4	3	4	4	4	4	1	4	4	3	4	4	4	86	A
37	4	4	4	4	4	3	3	1	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	1	3	3	2	4	4	4	85	A
38	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	91	A
39	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	3	4	2	3	4	2	4	4	4	3	4	3	4	4	4	88	A
40	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	2	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	91	A
41	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	90	A
42	4	4	4	4	4	2	3	3	3	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	90	A
43	4	4	4	4	4	3	2	3	2	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	2	4	3	4	4	4	88	A
44	4	4	4	4	4	4	3	3	2	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	89	A
45	4	4	4	4	4	3	4	2	3	4	2	3	4	4	3	3	4	4	3	2	3	3	4	4	4	86	A
46	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	3	3	2	3	3	4	4	4	3	2	4	2	4	3	4	80	B
47	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	1	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	89	A
48	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	0	3	3	3	4	4	1	2	3	3	3	4	4	79	B
49	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	0	4	4	3	3	4	0	1	3	2	4	3	4	79	B	
50	4	4	4	4	4	3	2	3	3	4	4	4	1	3	4	4	4	4	2	3	2	4	4	4	90	A	

Sumber : Data Hasil Penelitian

Lampiran 4. Daftar Hasil Ujian Nasional SMP Kabupaten Buton Tahun Ajaran 2005/2006 – 2007/2008^{14/41244.pdf}

No	KABUPATEN	SMP/MTs	JUMLAH PESERTA	TAHUN PELAJARAN																				
				2005/2006					SELURUSAN	SERTA LAIN	2006/2007					SELURUSAN	SERTA LAIN	2007/2008					SELURUSAN	
				TESAWAKO	IKUT	PA	IKUT	PA			TESAWAKO	IKUT	PA	IKUT	PA			TESAWAKO	IKUT	PA	IKUT	PA		
01	Pasarwajo	SMPN 1 Pasarwajo	385	5,80	5,65	6,32	6,88	6,16	100	367	6,02	5,90	6,10	7,16	6,29	100	334	6,12	6,05	5,78	7,21	6,29	100	
				A. TDK IKUT					001		A. TDK IKUT					000		A. TDK IKUT					002	
				B. IKUT					384		B. IKUT					367		B. IKUT					332	
				LULUS					375		LULUS					365		LULUS					332	
02	Batauga	SMPN 1 Batauga	164	5,70	5,01	6,20	6,23	5,78	100	182	5,90	5,20	6,35	7,00	6,11	100	187	6,10	6,14	6,00	7,13	6,34	90,08	
				A. TDK IKUT					002		A. TDK IKUT					001		A. TDK IKUT					002	
				B. IKUT					198		B. IKUT					181		B. IKUT					185	
				LULUS					198		LULUS					181		LULUS					168	
03	Siompu	SMPN 1 Siompu	160	5,25	5,20	5,80	6,40	5,66	98,73	172	6,23	5,98	6,06	7,10	6,33	98,84	178	6,00	5,90	6,24	7,14	6,32	97,14	
				A. TDK IKUT					000		A. TDK IKUT					000		A. TDK IKUT					003	
				B. IKUT					158		B. IKUT					172		B. IKUT					175	
				LULUS					156		LULUS					170		LULUS					170	
04	Siompu Barat	SMPN 1 Siompu Barat	176	5,68	5,89	5,90	6,50	5,95	98,28	185	5,90	5,08	6,24	7,00	6,05	97,29	200	6,10	6,02	6,14	6,80	6,27	98,97	
				A. TDK IKUT					001		A. TDK IKUT					000		A. TDK IKUT					004	
				B. IKUT					175		B. IKUT					185		B. IKUT					196	
				LULUS					172		LULUS					180		LULUS					194	
05	Kadatua	SMPN 1 Kadatua	98	5,68	5,64	5,84	6,60	5,94	97,94	110	5,70	5,28	5,90	6,50	5,84	100	121	5,70	5,32	6,40	6,00	5,85	95,83	
				A. TDK IKUT					001		A. TDK IKUT					000		A. TDK IKUT					001	
				B. IKUT					097		B. IKUT					110		B. IKUT					120	
				LULUS					095		LULUS					110		LULUS					115	
06	Kadatua	SMPN 2 Kadatua	60	5,10	4,90	5,68	6,30	5,50	96,67	65	4,90	5,20	6,10	6,90	5,77	95,38	80	5,21	5,24	6,42	7,00	5,92	97,43	
				A. TDK IKUT					000		A. TDK IKUT					000		A. TDK IKUT					002	
				B. IKUT					060		B. IKUT					065		B. IKUT					078	
				LULUS					058		LULUS					062		LULUS					076	
07	Sampolawa	SMPN 1 Sampolawa	168	4,89	5,20	5,79	6,00	5,47	95,80	180	5,18	5,42	5,31	6,00	5,48	98,88	183	5,20	4,42	6,22	6,60	5,61	88,88	
				A. TDK IKUT					001		A. TDK IKUT					000		A. TDK IKUT					003	
				B. IKUT					167		B. IKUT					180		B. IKUT					180	
				LULUS					160		LULUS					178		LULUS					160	

No	KEMENTERIAN	SEKOLAH	SERTA UAN	TAHUN PELAJARAN																			
				2005/2006					KELULUSAN	SERTA UAN	2006/2007					KELULUSAN	SERTA UAN	2007/2008					KELULUSAN
				TEMATKA	INGGRIS	PA	INDONESIA	NILAI RATA-RATA			TEMATKA	INGGRIS	PA	INDONESIA	NILAI RATA-RATA			TEMATKA	INGGRIS	PA	INDONESIA	NILAI RATA-RATA	
08	Sampolawa	SMPN 2 Sampolawa	45	4,80	5,24	5,68	6,70	5,60	100	50	4,92	5,26	5,62	7,00	5,70	98,00	53	5,10	5,24	5,80	7,10	5,81	100
				A. TDK IKUT							A. TDK IKUT							A. TDK IKUT					
				B. IKUT							B. IKUT							B. IKUT					
				LULUS							LULUS							LULUS					
09	Kapontori	SMPN 2 Kapontori	42	5,10	5,65	5,26	6,20	5,55	97,62	40	5,24	5,00	5,68	6,54	5,62	100	45	5,24	5,20	5,68	7,00	5,78	100
				A. TDK IKUT							A. TDK IKUT							A. TDK IKUT					
				B. IKUT							B. IKUT							B. IKUT					
				LULUS							LULUS							LULUS					
10	Lakudo	SMPN 1 Lakudo	62	5,22	5,60	5,84	6,88	5,88	100	60	5,63	5,40	6,00	6,80	5,96	96,67	72	4,90	5,40	5,90	6,80	5,74	97,72
				A. TDK IKUT							A. TDK IKUT							A. TDK IKUT					
				B. IKUT							B. IKUT							B. IKUT					
				LULUS							LULUS							LULUS					
11	Lakudo	SMPN 2 Lakudo	110	5,10	5,56	5,02	6,20	5,47	98,18	115	5,32	5,50	5,42	6,60	5,71	99,13	124	5,25	5,68	6,50	6,86	5,95	97,58
				A. TDK IKUT							A. TDK IKUT							A. TDK IKUT					
				B. IKUT							B. IKUT							B. IKUT					
				LULUS							LULUS							LULUS					
12	Lakudo	SMPN 3 Lakudo	86	5,30	5,46	5,96	6,10	5,71	100	90	5,45	5,30	6,10	6,98	5,38	100	94	5,60	5,86	6,30	7,10	6,17	96,80
				A. TDK IKUT							A. TDK IKUT							A. TDK IKUT					
				B. IKUT							B. IKUT							B. IKUT					
				LULUS							LULUS							LULUS					
13	Lakudo	SMPN 4 Lakudo	46	4,80	5,00	5,42	6,00	5,30	93,48	52	5,41	5,20	5,25	6,40	5,56	100	59	5,22	5,42	5,10	6,20	5,49	91,52
				A. TDK IKUT							A. TDK IKUT							A. TDK IKUT					
				B. IKUT							B. IKUT							B. IKUT					
				LULUS							LULUS							LULUS					
14	GU	SMPN 1 Gu	148	5,42	5,68	5,96	6,30	5,84	98,65	150	5,60	5,85	6,06	6,84	6,09	100	154	5,68	5,70	6,20	7,10	6,17	98,68
				A. TDK IKUT							A. TDK IKUT							A. TDK IKUT					
				B. IKUT							B. IKUT							B. IKUT					
				LULUS							LULUS							LULUS					
15	Sangia Wambulu	SMPN 2 Sangia Wambulu	42	5,60	5,28	5,85	6,50	5,80	100	45	4,92	5,26	5,62	7,00	5,70	93,33	48	5,20	5,42	5,60	7,20	5,86	93,75
				A. TDK IKUT							A. TDK IKUT							A. TDK IKUT					
				B. IKUT							B. IKUT							B. IKUT					
				LULUS							LULUS							LULUS					

Lampiran 5. Daftar Lokasi Penelitian

No	Lokasi Sekolah Berdasarkan Zona	Alamat Sekolah
A.	Wilayah Daratan Buton :	
	1. SMP Negeri 1 Pasarwajo	Kecamatan Pasarwajo
	2. SMP Negeri 1 Batauga	Kecamatan Batauga
	3. SMP Negeri 1 Sampolawa	Kecamatan Sampolawa
	4. SMP Negeri 2 Sampolawa	Kecamatan sampolawa
	5. SMP Negeri 2 Kapontori	Kecamatan Kapontori
B.	Wilayah Kepulauan :	
	1. SMP Negeri 1 Siompu	Kecamatan Siompu
	2. SMP Negeri 1 Siompu Barat	Kecamatan Siompu Barat
	3. SMP Negeri 1 Kadatua	Kecamatan Kadatua
	4. SMP Negeri 2 Kadatua	Kecamatan Kadatua
C.	Wilayah Daratan Muna :	
	1. SMP Negeri 1 Lakudo	Kecamatan Lakudo
	2. SMP Negeri 2 Lakudo	Kecamatan Lakudo
	3. SMP Negeri 3 Lakudo	Kecamatan Lakudo
	4. SMP Negeri 4 Lakudo	Kecamatan Lakudo
	5. SMP Negeri 1 Gu	Kecamatan Gu
	6. SMP Negeri 2 Sangia Wambulu	Kecamatan Sangia Wambulu

Lampiran 6. Rangkuman Hasil Wawancara Penulis dengan Responden

Nomor Pertanyaan	Jawaban /Tanggapan Responden
1	Masyarakat sangat mendukung terhadap pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.
2	Pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan dasar 9 tahun agar semua usia wajib belajar 9 tahun dapat mengenyam pendidikan minimal tamatan SMP atau yang sederajat.
3	Kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun sangat relevan terhadap peningkatan kualitas pendidikan
4	Kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun di sekolah cukup baik
5	Kebijakan wajib belajar 9 tahun yang dibuat pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan global.
6	Masyarakat dalam menyampaikan usulan, gagasan dan kritikan terhadap sekolah yang melaksanakan kebijakan pemerintah wajib belajar 9 tahun sangat aktif.
7	Target pencapaian wajib belajar 9 tahun disetiap sekolah pertahun dapat mengalami peningkatan
8	Tanggapan masyarakat terhadap pencapaian target wajib belajar 9 tahun telah mengalami peningkatan.
9	Proses pengelolaan sekolah dalam melaksanakan program pemerintah wajib belajar 9 tahun dapat dilakukan secara jujur, objektif, transparan dan akuntabilitas.
10	Program wajib belajar 9 tahun telah berjalan dengan baik dan maksimal.
11	<p>Kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di sekolah adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pemahaman siswa dan orang tua tentang arti dan pentingnya pendidikan untuk masa depan. b. Adanya pemikiran siswa bahwa biar malas dan bodoh tetap naik kelas karena menyuskseskan program pemerintah c. Adanya tanggapan orang tua bahwa semua kebutuhan siswa telah ditanggung oleh pihak sekolah.
12	Apabila sekolah menghadapi kendala dalam pencapaian target wajib belajar sembilan tahun maka pihak sekolah bersama-sama masyarakat , komite dan pemerintah serta instansi yang terkait untuk mencari solusi dari permasalahan.
13	Penerapan wajib belajar 9 tahun terdapat siswa di sekolah telah berjalan dengan baik.

Nomor Pertanyaan	Jawaban /Tanggapan Responden
14	Manfaat yang diperoleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah wajib belajar 9 tahun adalah dapat meringankan beban orang tua dan mengurangi siswa yang putus sekolah.
15	Manfaat yang diperoleh sekolah terhadap kebijakan pemerintah wajib belajar 9 tahun adalah banyak program sekolah yang terealisasi dengan baik, adanya peningkatan kualitas pendidikan serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah .
16	Kebijakan pemerintah wajib belajar 9 tahun sangat bermanfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan
17	Manfaat wajib belajar sembilan tahun yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan sekolah adalah dapat meringankan beban orang tua siswa serta meningkatnya kualitas pendidikan .
18	Pengelolaan pendidikan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Buton sudah cukup bagus namun mekanisme dan pengelolaannya masih perlu disempurnakan.
19	Pemerintah Kabupaten Buton dan DPRD sangat mendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun .
20	Komite sekolah, tokoh masyarakat, dan praktisi pendidikan selalu dilibatkan dalam program kegiatan wajib belajar 9 tahun disekolah
21	DPRD Kabupaten Buton memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di sekolah.
22	LSM memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di sekolah
23	Pemerintah Kabupaten Buton memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di sekolah
24	Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun telah memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan baik dalam proses belajar mengajar, hasil ujian Nasional maupun ujian sekolah dalam rangka peningkatan sumber daya sekolah.
25	Siswa usia pendidikan dasar yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi karena kurangnya kesadaran terhadap arti dan pentingnya pendidikan serta adanya asumsi bahwa biar tidak sekolah di pendidikan formal saya tetap memiliki Ijazah yaitu melalui paket A atau B maupun C.

Lampiran 7. Pedoman Wawancara

Pertanyaan :

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendapat masyarakat luas mengenai kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun.
2. Menurut Bapak/Ibu , apa yang menjadi alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 9 tahun ?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana relevansi kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah ?
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kerjasama antara masyarakat dengan sekolah, pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun ?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang dibuat pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan global ?
6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keaktifan masyarakat dalam menyampaikan usulan, gagasan dan kritikan terhadap sekolah yang melaksanakan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar sembilan tahun ?
7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana target pencapaian wajib belajar sembilan tahun untuk setiap sekolah pertahun
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian target wajib belajar sembilan tahun ?
9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses pengelolaan sekolah dalam melaksanakan program pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun.
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah program wajib belajar 9 tahun sudah berjalan dengan baik dan maksimal ?
11. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun ?
12. Menurut Bapak/Ibu, kalau sekolah menghadapi kendala hambatan dalam mencapai target wajib belajar sembilan tahun, pihak sekolah bersama-sama masyarakat dapat mencari solusi. ?
13. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penyerapan wajib belajar 9 tahun terhadap siswa di sekolah-sekolah.

14. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana manfaat yang dapat diperoleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun tersebut ?
15. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana manfaat yang dapat diperoleh sekolah terhadap kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun tersebut ?
16. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun dapat memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
17. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana manfaat wajib belajar 9 tahun itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun sekolah ?
18. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kab. Buton sudah perlu dievaluasi oleh pemerintah dalam rangka untuk mengetahui kendala pengelolaannya ?
19. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dukungan DPR dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah wajib belajar 9 tahun di daerah ini ?
20. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keterlibatan komite sekolah, Praktisi pendidikan, tokoh masyarakat dan pemuka agama terhadap pelaksanaan wajib belajar 9n tahun di sekolah ?
21. Menurut Bapak/Ibu, tanggapan DPR terhadap pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun di sekolah selama ini ?
22. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tanggapan LSM terhadap pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun
23. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton terhadap pelaksanaan wajib belajar 9 tahun ?
24. Menurut Bapak/Ibu, pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan meningkatkan mutu pendidikan baik dalam proses belajar mengajar, hasil/nilai UAN/UAS dan peningkatan sumber daya sekolah ?
25. Menurut bapak/Ibu, mengapa peserta didik usia SD dan SMP tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. SD, SMP dan SMA/SMK dan MA

Lampiran 7. Angket Penelitian

1. Tulislah Nama dan Jabatan Bapak / Ibu pada kolom format yang telah disediakan
2. Angket ini bertujuan untuk mengetahui "Efektifitas Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Buton" Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan .
3. Sebagai salah satu pra syarat dalam rangka penyelesaian studi pada Program Magister (S.2) Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Manajemen Administrasi Publik Universitas Terbuka Kendari .
4. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur berdasarkan pengamatan dan Pendapat Bapak/Ibu .

IDENTITAS RESPONDENT

NAMA LENGKAP :
JABATAN :
UNIT KERJA :
TANGGAL PENGISIAN :
TANDA TANGAN : (.....)

1. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat meningkatkan kualitas pendidikan :

a. tidak setuju	b. kurang setuju	c. ragu-ragu
d. setuju	e. sangat setuju	
2. Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dapat meminimalkan dan mengatasi siswa yang putus sekolah .

a. tidak setuju	b. kurang setuju	c. ragu-ragu
d. setuju	e. sangat setuju	
3. Program pemerintah tentang pendidikan dasar 9 tahun dapat membantu orang tua siswa yang kurang mampu.

a. tidak setuju	b. kurang setuju	c. ragu-ragu
d. setuju	e. sangat setuju	
4. Program pemerintah tentang pendidikan dasar 9 tahun dapat meringankan beban orang tua siswa sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menyekolahkan putra-putrinya .

a. tidak setuju	b. kurang setuju	c. ragu-ragu
d. setuju	e. sangat setuju	
5. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat mendorong angka partisipasi kasar usia sekolah 07 – 15 tahun meningkat :

a. tidak setuju	b. kurang setuju	c. ragu-ragu
d. setuju	e. sangat setuju	

6. Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun , bukan berarti pihak sekolah setiap akhir tahun ajaran siswanya harus lulus atau naik kelas.
- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| a. tidak setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. sangat setuju | |
7. Setiap akhir tahun ajaran siswa harus lulus atau naik kelas karena apabila ada yang tidak berhasil maka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun belum terlaksana secara efektif .
- | | | |
|------------------|------------------|--------------|
| a. Sangat setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. Tidak setuju | |
8. Ruang kelas kegiatan proses belajar mengajar cukup representatif antara jumlah siswa dengan jumlah rombongan belajar.
- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| a. tidak setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. sangat setuju | |
9. Buku pelajaran penunjang proses belajar mengajar cukup memadai :
- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| a. tidak setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. sangat setuju | |
10. Setiap akhir tahun ajaran siswa yang putus sekolah pada setiap sekolah sejumlah
- | | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| a. 21 ke atas | b. 16 – 20 orang | c. 11 – 15 orang |
| d. 6 – 10 orang | e. 00 – 05 orang | |
11. Menurut Bapak / Ibu faktor penyebab siswa putus sekolah atau drop out adalah :
- Keterbatasan ekonomi keluarga
 - Pengaruh lingkungan
 - Ingin bekerja untuk mendapatkan uang walaupun jadi buruh kasar (petani/nelayan)
 - Kurangnya kesadaran tentang arti dan pentingnya pendidikan .
 - semua benar
12. Pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun telah berjalan secara efektif.
- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| a. tidak setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. sangat setuju | |
13. Program pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan non formal kususnya paket A, B dan C sebaiknya dihapus saja sehingga siswa lebih serius untuk belajar pada pendidikan formal .
- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| a. tidak setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. sangat setuju | |
14. Program pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan non formal kususnya paket A, B dan C dapat menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun :
- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| a. tidak setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. sangat setuju | |

15. Program pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan non formal khususnya paket A, B dan C tetap dilaksanakan namun perlu ada penyempurnaan karena program tersebut dapat menurunkan motivasi belajar siswa yang sekolah di pendidikan formal :
- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| a. tidak setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. sangat setuju | |
16. Pelaksanaan program paket A, B dan C harus melalui proses tatap muka dengan tutor :
- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| a. tidak setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. sangat setuju | |
17. Mayoritas siswa usia sekolah SD dan SMP telah memperoleh pendidikan dasar 09 tahun :
- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| a. tidak setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. sangat setuju | |
18. Program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun khususnya adanya bantuan operasional sekolah (BOS) sangat membantu dan meringankan beban orang tua siswa
- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| a. tidak setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. sangat setuju | |
19. Manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya program wajib belajar 9 tahun adalah :
- dapat mengurangi drop out
 - dapat meringankan beban orang tua siswa
 - anak dapat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan
 - meningkatkan kualitas pendidikan
 - Semua benar
20. Implementasi kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun adalah salah satu Program pemerintah dalam upaya mengantisipasi tuntutan global.
- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| a. tidak setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. sangat setuju | |
21. Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dapat mengatasi kurangnya angka pengangguran pada setiap desa/kecamatan :
- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| a. tidak setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. sangat setuju | |
22. Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dapat meningkatkan kualitas pendidikan setiap tahun secara signifikan :
- | | | |
|-----------------|------------------|--------------|
| a. tidak setuju | b. kurang setuju | c. ragu-ragu |
| d. setuju | e. sangat setuju | |

23. Orang tua siswa sangat antusias untuk menyekolahkan anak-anaknya pada pendidikan dasar 9 tahun karena dapat meringankan beban ekonomi keluarga.
- a. tidak setuju b. kurang setuju c. ragu-ragu
d. setuju e. sangat setuju
24. Kekurangan sarana ruang belajar mengajar dapat diatasi karena adanya program wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah :
- a. tidak setuju b. kurang setuju c. ragu-ragu
d. setuju e. sangat setuju
25. Dalam mengasipasi tuntutan global sekarang pemerintah seharusnya sudah menerapkan pendidikan dasar wajib belajar 12 tahun :
- a. tidak setuju b. kurang setuju c. ragu-ragu
d. setuju e. sangat setuju

TERIMA KASIH ATAS KESEDIAN BAPAK/IBU DALAM MENJAWAB PERTANYAAN YANG KAMI AJUKAN , SEMOGA JAWABAN BAPAK / IBU DAPAT MEMBERIKAN APRESIASI TERHADAP PENGELOLAAN WAJIB BELAJAR SEMBILAA TAHUN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN BUTON.

PASARWAJO, 18 Dseember 2008
PENELITI,


Drs. LA SAFILIN

BIODATA PENULIS

LA SAFILIN , lahir di Buton tanggal 23 Mei 1968, anak kedelapan dari pasangan La Opi bin La Ami dengan Wa Abe Binti La Umara. Menyelesaikan Pendidikan SD Negeri 1 Kambara di Desa Lawela Kecamatan Batauga tahun 1981, SMP Negeri Betoambari tahun 1983, SMA Negeri 2 Bau-Bau tahun 1986 dan Perguruan Tinggi S.1 di Unhalu tahun 1990 pada Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, memperoleh gelar Magister Sains Program Studi Magister Administrasi Publik tahun 2009, Universitas Terbuka Jakarta pada UPBJJ UT Kendari.

Pengalaman pekerjaan ; sebagai guru di SMA Negeri 1 Mawasangka Kabupaten Buton 1992 – 1994, guru SMA Negeri 3 Kota Bau-Bau tahun 1995 – 2002, Kepala SMA Negeri 1 Batauga Kabupaten Buton tahun 2003 sampai sekarang. Memiliki satu orang istri bernama Hertina, S.Pd. Mat lahir di Bau-Bau, tanggal 10 Desember 1970, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Guru SMP Negeri 7 Bau-Bau, dan empat orang anak yaitu; pertama Fitriya Damayana kedua Muhamad Al Ikhsan, ketiga Muhamad Al Ikhlis dan keempat Fathimah Salsabillah.

Alamat tempat tinggal Jalan DR. Wahidin No. 142 A Lorong Kuningan Kelurahan Lamangga RT 02 WR 03 Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau Telepon 0402 286973 HP. 08134929440.